

**TANTANGAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2002-2003**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

***Nur Hamidah Lutfah***

**NIM : 084 981 095**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN TARBIYAH  
MARET 2004**

**TANTANGAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2002-2003**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I)  
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Nur Hamidah Lutfah  
NIM : 084981095

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN TARBIYAH  
MARET, 2004**



**TANTANGAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2002-2003**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I)  
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Nur Hamidah Lutfa  
NIM : 084981095

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN TARBIYAH  
MARET, 2004**

TANTANGAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2002-2003

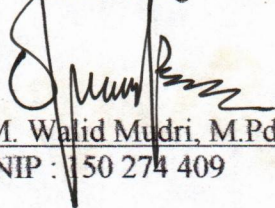
**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I)  
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Nama : Nur Hamidah Lutfah  
NIM : 084981095  
Jurusan : Tarbiyah  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Drs. M. Walid Mudri, M.Pd.I  
NIP : 50 274 409



**TANTANGAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2002-2003**

**SKRIPSI**

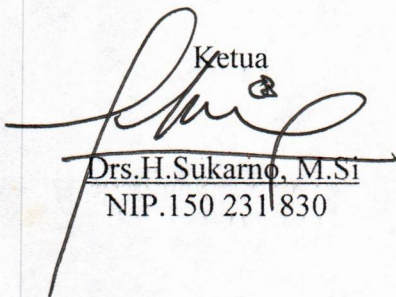
Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember  
Dan Diterima Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)  
Jurusan Tarbiyah  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pada :

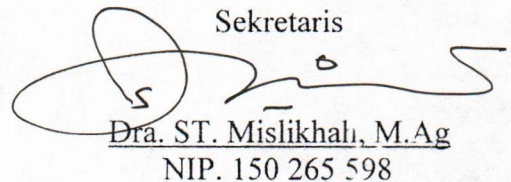
Hari : Sabtu  
Tanggal : 27 Maret 2004

Tim Penguji


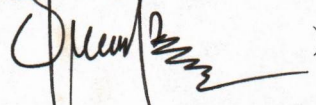
Ketua

  
Drs. H. Sukarno, M.Si  
NIP. 150 231 830

Sekretaris

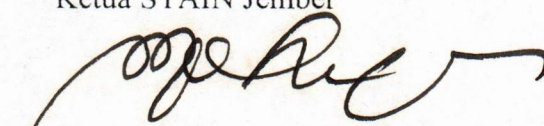
  
Dra. ST. Mislikhal, M. Ag  
NIP. 150 265 598

Anggota

1. Drs. Abd. Rahman Ds, M.Pd (  )
2. Drs. M. Walid Mudri, M.Pd.I (  )

Mengetahui

Ketua STAIN Jember

  
Drs. H. Mahjuddin, M.Pd.I  
NIP. 150 206 244

**MOTTO :**

**QS. Ar-Ra'du : 11**

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

**Artinya :**

**“ ... sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri ....” (Depag, 1981 : 370)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ibunda yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, do'a dan kasih sayangnya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ;
2. saudara-saudaraku: Lutfi Burhanullah, Lutfi Halilullah dan Lutfia Indah Setiyorini atas supportnya selama ini ;
3. yang terhormat Drs. Walid Mudri, M.Pd.I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya tugas akhir ini ;
4. teman-temanku : Ifa, Zoel dan Fitri yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis ;
5. almamaterku yang kubanggakan, khususnya Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Jember.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tantangan Pendidikan MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada STAIN Jember.

Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Endang Setiawati atas dedikasinya selama ini ;
2. Bpk. Drs.H. Mahjuddin, M.Pd.I selaku Ketua STAIN Jember ;
3. Ibu. Hj. Titiek Rohana, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Jember ;
4. Bpk. Drs. M.Walid Mudri, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing mulai awal hingga akhir penyusunan skripsi ini ;
5. MTs Al Barokah, MTs Al Ma'arif, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin atas kerjasamanya selama penelitian dan
6. semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pihak demi kemajuan dunia pendidikan, utamanya pendidikan formal.

Jember, Maret 2003  
Penulis



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tantangan Pendidikan MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada STAIN Jember.

Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Endang Setiawati atas dedikasinya selama ini ;
2. Bpk. Drs.H. Mahjuddin, M.Pd.I selaku Ketua STAIN Jember ;
3. Ibu. Hj. Titiék Rohana, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Jember ;
4. Bpk. Drs. M.Walid Mudri, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing mulai awal hingga akhir penyusunan skripsi ini ;
5. MTs Al Barokah, MTs Al Ma’arif, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin atas kerjasamanya selama penelitian dan
6. semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pihak demi kemajuan dunia pendidikan, utamanya pendidikan formal.

Jember, Maret 2003

Penulis



## ABSTRAK

### TANTANGAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2002-2003

Oleh

Nur Hamidah Lutfi  
084 981095

Sekolah merupakan masyarakat kecil yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memperbaiki hidupnya. Sekolah yang lahir karena kebutuhan historis masyarakat akan pendidikan tentunya harus berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakatnya. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kelahirannya didominasi atas prakarsa masyarakat, tetapi keberadaannya seringkali dinomorduakan dari sekolah umum, karena pada faktanya memang banyak madrasah kurang mampu merespon harapan masyarakat, baik menyangkut pengetahuan maupun keterampilan. Padahal masyarakat tidaklah statis tetapi terus berkembang, sehingga sangatlah penting untuk segera memetakan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh madrasah, khususnya tingkat dasar.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tantangan pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003, mencakup tantangan internal dan tantangan eksternal.

Metode dan prosedur yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis serta berdasarkan pada kajian pustaka dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penentuan responden menggunakan purposive sampling, sebanyak 12 orang guru dari 4 MTs swasta di Pujer, yaitu MTs Al Barokah, MTs Al Ma'arif, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter.

Berdasarkan penyajian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa tantangan pendidikan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso secara internal adalah demokrasi pendidikan yang belum berjalan dengan baik, kurangnya efektifitas implementasi kurikulum dalam proses pendidikan dan ini terkait dengan program pendidikan yang masih lemah, rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang terkait dengan kurangnya selektifitas rekrutmen, tingkat drop out yang masih tinggi serta minus sumber daya pendidikan baik berupa pendanaan maupun sarana prasarana.



Tantangan eksternal pendidikan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Puger pada tataran global berupa rendahnya kemampuan mengakses teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan dan rendahnya kemampuan madrasah memberi nilai ekonomis pada output-nya. Pada tataran nasional berupa kurangnya kesiapan madrasah menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan perlunya pemantapan program-program pendidikan yang khusus diproyeksikan untuk meminimalisasi degradasi moral.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Penegasan Judul .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Asumsi dan Keterbatasan .....	9
H. Metode dan Prosedur Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>15</b>
A. Perkembangan Madrasah di Indonesia .....	15



B. Tantangan Pendidikan di Madrasah .....	18
1. Tantangan Internal .....	18
a. Demokrasi Pendidikan .....	19
b. Kurikulum .....	21
c. Tenaga Kependidikan .....	25
d. Drop Out .....	27
e. Sumber Daya Pendidikan .....	28
2. Tantangan Eksternal .....	30
a. Tantangan Kecenderungan Global .....	30
b. Tantangan Kecenderungan Nasional .....	35
<b>BAB III:HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Obyek Penelitian .....	41
B. Deskripsi Data .....	42
C. Analisa Data .....	63
D. Diskusi dan Interpretasi .....	74
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Rakorkesra yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2001, Mendiknas memaparkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, antara lain: "Hasil study The Third International Mathematics and Science Study Repeat (1999) menunjukkan bahwa untuk IPA, siswa SLTP Indonesia menempati peringkat ke-32 dan matematika ke-34 dari 38 negara yang disurvei di Asia, Australia dan Afrika" (Suderadjat, 2002:1).

Data diatas menggambarkan rendahnya mutu output Sekolah Menengah Pertama negara ini. Mutu pendidikan yang rendah tersebut berkaitan dengan rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data: "Survai The Political and Economic Risk Consultation melaporkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-12 dari 12 negara yang disurvei, satu peringkat dibawah Vietnam" (Suderadjat, 2002 : 2).

Rendahnya mutu sistem pendidikan berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia, berdasarkan "Penelitian yang dilakukan oleh Human Development Index (HDI) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 106 negara yang disurvei, satu peringkat dibawah Vietnam" (Suderadjat, 2002:3).



Seluruh fakta tersebut merupakan pukulan berat bagi dunia pendidikan kita, karena hal itu berarti tujuan dari pendidikan nasional belum tercapai. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) Pasal 3 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (2003 : 7)

Ketika seluruh tujuan tersebut tidak tercapai, lembaga pendidikan formal dianggap gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencetak kader-kader intelektual dan kader-kader pembangunan yang berkualitas. Hal itu wajar, karena hingga saat ini sekolah dianggap sebagai salah satu basis pendidikan yang cukup strategis untuk melaksanakan misi pendidikan. "Tingkat pendidikan warga masyarakat (anak didik, rakyat) sebagai hasil dari pendidikan formal itu merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu bangsa dan besarnya keikutsertaan warga negara dalam kegiatan pembangunan" (Kartono, 1992 : 4).

Walaupun asumsi itu tidak sepenuhnya benar tetapi tanggung jawab sekolah tetaplah besar, mengingat harapan masyarakat begitu besar terhadap pendidikan formal. Harapan masyarakat ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu:

1. Masyarakat selain masih belum mempunyai kapasitas intelektual yang memadai, juga masih harus bergulat dengan berbagai problema yang



pelik, sebagai akibat dari ketimpangan struktur politik, ekonomi, sosial dan kultural yang kurang berpihak kepada mereka. Karena itu dapat dipahami jika mereka menyerahkan putra-putranya terhadap pendidikan formal, dengan harapan agar kehidupan mereka bisa tertolong.

2. Pengabaian terhadap pendidikan formal sebagaimana yang telah dirasakan oleh masyarakat, akan melahirkan ortodokisme, primitivisme dan ketidak berdayaan dalam menghadapi arus perubahan sosial.
3. Pendidikan formal secara konseptual mempunyai orientasi yang jelas, baik dari segi kurikuler, metodologis, sasaran yang harus dicapai dan semacamnya (Munif, 1997 : 61).

Dari alasan-alasan diatas, tidaklah berlebihan jika pendidikan formal diminati masyarakat. Tetapi sayang sekali, pendidikan formal belum memperlihatkan peran optimalnya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Sementara disisi lain masyarakat terus berkembang dan berubah dengan cepat. Masyarakat harus menghadapi permasalahan di abad XXI. Pada abad XXI itu dunia dihadapkan pada permasalahan global, pasar bebas, kompetitif yang tinggi, informasi yang cepat, serta teknologi yang bergerak pesat. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan dunia ini semakin menyempit hingga membentuk suatu masyarakat dunia yang saling bergantung. Untuk mengantisipasi semua permasalahan tersebut dibutuhkan manusia yang mampu menyasati teknologi, informasi dan ekonomi yang kuat. Menjadi tugas pendidikanlah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya kompetitif tinggi. Sekolah sebagai salah satu elemen pendidikan tidak bisa menafikan semua perubahan yang terjadi disekitarnya.



Masyarakat semakin lama semakin kritis dan semakin selektif. Sekolah yang mampu menawarkan berbagai kelebihan yang bermanfaat bagi kemajuan dan masa depan peserta didik tidak mustahil akan menjadi pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Sebaliknya sekolah yang tidak responsif terhadap perkembangan zaman tidak mungkin mampu bersaing dalam menjaring siswa. Fenomena tersebut mulai terjadi di Indonesia, sebagaimana yang dikutip Saifudin dari Kompas edisi II / 9 tahun 2000, " Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta bahwa berbagai sekolah baik negeri maupun swasta pada jenjang SD dan SLTP terpaksa tidak membuka kelas satu, karena kekurangan siswa. Padahal disinyalir pada dasawarsa yang lalu sekolah-sekolah tersebut sempat berjaya (Pendaiss, 2000 : 66).

Gambaran diatas menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang perlu direspon oleh sekolah untuk meningkatkan kualitasnya, khususnya sekolah yang dikelola oleh masyarakat, karena lembaga tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat pendirinya. Namun selama ini lembaga pendidikan formal berstatus swasta sebagai lembaga mayoritas dianggap belum memenuhi harapan tersebut. Terlebih lembaga formal berciri Islam seringkali dipandang sebelah mata. Selain diperbandingkan dengan sesamanya yang berstatus negeri juga harus diperbandingkan dengan sekolah umum yang notabene lebih lengkap sarana prasarannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah harus mampu seiring dengan perkembangan faktor-faktor disekelilingnya agar tetap eksis.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan adalah dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkaan, tuduhan, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1987 : 29).

Berdasarkan keterangan tersebut maka yang menjadi alasan peneliti adalah:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan masyarakat yang masih dipercaya masyarakat sebagai benteng moral serta diharapkan dapat memperbaiki taraf hidupnya, sehingga perlu memperhatikan problematika yang terjadi disekitarnya.
- b. Ada kesenjangan pendidikan formal antara kota dan daerah, karena kurangnya kemampuan daerah mengikuti perkembangan nasional.
- c. Secara obyektif, dengan lingkungan dan materi kurikulum yang ada, seharusnya lembaga pendidikan Islam menghasilkan output yang lebih unggul dari lembaga pendidikan lain.
- d. Lembaga pendidikan formal berstatus swasta lebih banyak daripada yang berstatus negeri, maka seharusnya menawarkan kualitas yang minimal sama dengan sekolah negeri.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Judul tersebut tidak menyimpang dari disiplin ilmu yang peneliti tekuni yaitu ketarbiyahan
- b. Tersedianya literatur, waktu dan dana yang memadai untuk penelitian



- c. Kesiediaan dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian.

### **C. Penegasan Judul**

Untuk menghindari salah penafsiran, perlu ditegaskan judul dari penelitian ini.

Istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Tantangan

Yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, bisa juga berarti hal atau objek yang perlu ditanggulangi (Salim, tt : 1542).

2. Pendidikan

Dalam ketentuan umum pasal 1 point 1 disebutkan ,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas, 2003 : 3).

3. MTs Swasta

Terdiri dari dua kata yaitu MTs dan swasta. MTs merupakan akronim dari Madrasah Tsanawiyah. Bab VI pasal 17 ayat 2 UU Sisdiknas menyebutkan, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (2003 :13).



Swasta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebut juga *partikelir* yang berarti bukan kepunyaan pemerintah ; tidak dinas. Sekolah partikelir artinya sekolah yang tidak didirikan pemerintah (Poerwadarminta, 1987 : 713).

Jadi MTs swasta adalah sekolah tingkat pendidikan dasar berciri Islam yang tidak didirikan pemerintah tetapi dikelola atas swadaya masyarakat.

Dari penegasan diatas, maka yang dimaksud tantangan pendidikan di MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003 adalah obyek, hal atau rangsangan yang perlu ditanggulangi dalam suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan sadar dan terencana dalam lembaga Madrasah Tsanawiyah yang dikelola masyarakat di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso pada tahun 2002-2003 untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah.

Dari penegasan diatas, maka yang menjadi bahasan dalam skripsi adalah hal-hal atau masalah yang perlu ditanggulangi untuk meningkatkan kemampuan MTs Swasta sebagai lembaga pendidikan formal.

#### **D. Perumusan Masalah**

Titik tolak penelitian jenis apapun tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan (Moleong, 2001 : 61). Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:



### 1. Masalah umum

Bagaimanakah tantangan pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003 ?

### 2. Masalah khusus

a. Bagaimanakah tantangan internal pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003 ?

b. Bagaimanakah tantangan eksternal pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003 ?

## E. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Untuk mendeskripsikan tantangan pendidikan di MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003.

### 2. Tujuan khusus

a. untuk mendeskripsikan tantangan internal pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003.

b. untuk mendeskripsikan tantangan eksternal pendidikan MTs swasta di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya:

### 1. Bagi peneliti

a. Menguji wawasan dan ilmu pengetahuan akademis.

- b. Sebagai pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat peneliti selama studi.
2. Bagi lembaga pendidikan dan pemerintahan
- a. Sebagai bahan informasi tentang adanya permasalahan yang perlu segera direspon dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan gambaran keadaan pendidikan dan sarana diagnosa dalam kegagalan pelaksanaan pendidikan
  - c. Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan dalam merumuskan suatu kebijakan dibidang pendidikan.
3. Bagi praktisi / mahasiswa tarbiyah
- a. Sebagai informasi tentang gambaran pendidikan formal khususnya yang dikelola oleh swasta di daerah
  - b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lanjutan tentang pendidikan formal.

#### **G. Asumsi dan Keterbatasan**

Beberapa asumsi yang mendasari penulisan skripsi berjudul “Tantangan Pendidikan MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tahun 2002-2003 “ adalah:

1. Harapan besar dibebankan masyarakat kepada pendidikan formal untuk memperbaiki taraf hidup mereka, maka diperlukan pendidikan yang dapat mengimbangi perubahan lingkungannya



2. Kondisi riil Indonesia dengan berbagai polemik misalnya krisis sejak pertengahan 1997, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat polemik politik, meningkatnya kasus kenakalan remaja sehingga dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk dapat mengatasi semua permasalahan tersebut
3. Penurunan kualitas pendidikan nasional khususnya pendidikan formal berkaitan dengan kondisi pendidikan formal di daerah karena pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang berasal dari bawah (bottom up).
4. Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan formal.
5. Penulis berangkat dengan keterbatasan pengetahuan sehingga membutuhkan bimbingan intensif dari segenap kalangan.

## **H. Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1. Penentuan populasi dan sampel**

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 1997 : 118). Sedangkan sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (monster) yang diambil dengan cara-cara tertentu (Margono, 1997 : 121).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh guru MTs swasta di Pujer. Di kecamatan Pujer ada 4 MTs Swasta yaitu MTs Al Barokah, MTs Al Ma'arif, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin.



Adapun pengambilan sampel dengan cara teknik Purposive Sampling.

Purposive Sampling adalah sampel yang bertujuan (Moleong, 2001 : 165).

Dalam purposive sampling sampel tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada generalisasi tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman studi dalam konteksnya. Peneliti memilih populasi yang dipandang paling mengetahui masalah yang akan dikaji (1997 : 42). Dan pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Margono, 1997 : 128).

Bertitik tolak pada penjelasan diatas maka penelitian ini menggunakan sampel 12 guru di MTs swasta di Pujer dengan alasan:

- a. Penelitian ini menggunakan sampel guru karena guru dianggap kompeten terhadap informasi yang diperlukan peneliti;
- b. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga tidak diperlukan prosentase khusus dalam pengambilan sampel;
- c. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk generalisasi, sehingga 12 orang responden sebagai sampel telah dapat mewakili informasi yang ingin didapatkan.

## 2. Metode pengumpulan data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif (Margono, 1997 : 158).



Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 1997 : 158). Dengan metode ini dicari:

- 1) Sarana pendidikan sekolah yang bersangkutan,
- 2) Proses pendidikan sekolah yang bersangkutan.

b. Interview

Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001 : 135).

Metode ini digunakan sebagai metode utama dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sasaran interview adalah kepala sekolah, guru-guru dan pihak-pihak yang terkait dalam perolehan data. Metode ini digunakan untuk mencari data:

- 1) Permasalahan internal dalam sekolah
- 2) Aplikasi program-program sekolah
- 3) Permasalahan eksternal sekolah akibat kecenderungan global dan nasional.

### c. Dokumenter

Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 1997 : 181).

Metode ini akan digunakan untuk memperoleh data:

- 1) Guru dan tenaga kependidikan
- 2) Partisipasi pendidikan
- 3) Drop out

### 3. Metode analisa data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2001 : 103).

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001 : 3). Penelitian kualitatif disebut penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 1992 : 18).



Paradigma yang digunakan adalah paradigma fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri (Moleong, 2001 : 31).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami serta memperjelas isi skripsi, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I sebagai bagian awal (pendahuluan), terdiri dari sembilan sub bab, yaitu: latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan, metode prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II menyajikan kerangka teoritik, bagian kedua ini menjabarkan tentang landasan teoritis dalam melakukan analisa untuk mempertajam persoalan, meliputi perkembangan madrasah di Indonesia dan tantangan pendidikan di madrasah

Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasannya, bagian ini menguraikan tentang objek penelitian, deskripsi data, analisa data dan diskusi interpretasi.

Bab IV memuat kesimpulan dan saran, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran konstruktif setelah dilakukan deskripsi dan analisa data serta hasil diskusi hasil interpretasi.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Perkembangan Madrasah di Indonesia

Lahirnya pendidikan formal dan sekolah merupakan kebutuhan historis dalam kehidupan manusia, karena masyarakatnya bersifat dinamis dan terus berubah (Kartono, 1992:5). Munculnya sekolah adalah atas dasar anggapan dan kenyataan bahwa umumnya para orang tua tidak mampu mendidik anak mereka secara sempurna dan lengkap (Pidarta, 1997 : 168). Karena itu mereka membutuhkan bantuan pihak lain.

Di Indonesia munculnya pendidikan formal dimulai sejak penjajah Portugis masuk ke Indonesia. Waktu orang-orang Portugis menyerbu Indonesia, mereka dibarengi oleh missionaris, yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Nasrani dikalangan penduduk Indonesia. Seorang diantaranya berpendapat, bahwa untuk memperluas penyebaran agama Nasrani itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah, tetapi pada abad ke-16 kekuasaan Portugis di Indonesia berakhir.

Berakhirnya kekuasaan Portugis digantikan oleh penjajah Belanda dan secara otomatis pendidikan yang diadakan Portugis diambil alih oleh Belanda. Pada abad 17 muncul aliran "Aufklarung"(pencerahan) dan mempengaruhi seluruh Eropa. Aliran ini menghendaki kebebasan manusia dari absolutisme negara, terutama kebebasan ekonomi. Terkait dengan aliran tersebut dalam lapangan pendidikan



muncul kepercayaan, bahwa pendidikan dapat menimbulkan perbaikan-perbaikan sosial. Pengaruh “pencerahan” itu juga masuk kenegeri Belanda, mereka berpikir untuk memperbaiki keadaan pendidikan di daerah jajahan. Pada tahun 1809 untuk pertama kalinya diselenggarakan pendidikan Bidan sebagai bagian dari usaha pemeliharaan kesehatan rakyat.

Sementara itu para pemimpin Indonesia menyadari bahwa pendidikan yang diselenggarakan penjajah bukanlah untuk mencerdaskan dan menumbuhkan nasionalisme rakyat Indonesia. Mereka sadar bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera diwujudkan. Maka lahirlah sekolah-sekolah swasta atas usaha perintis-perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua, yaitu sesuai dengan haluan politik serta sesuai dengan tuntutan agama (Islam). Disamping kedua golongan tersebut diatas, banyak pula sekolah-sekolah partikelir yang tidak mempunyai corak apa-apa (Jumhur dan Danasuparta, 1976 : 149). Masuk dalam sekolah berhaluan agama adalah madrasah yang pada awalnya hanya memberikan pengetahuan agama saja. Sehingga kurang lebih pada tahun 1931 terjadi perubahan besar, kedalam madrasah-madrasah mulai dimasukkan pengetahuan umum (vak-vak realia).

Madrasah muncul karena interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern. Pada masa penjajahan hingga tahun 1950-an madrasah memiliki konotasi sebagai lembaga pendidikan formal yang dibedakan dengan “sekolah” yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Perbedaan



terletak pada dasar filosofi pendiriannya yaitu untuk mendidik anak agar mengetahui ajaran agama dan kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi pendidikan yang dikembangkan lebih ditujukan untuk mencapai keridhaan Tuhan. Ketika zaman berubah dan kemerdekaan telah diperoleh, pemikiran untuk mengembangkan madrasah terus menerus dilakukan. Kebutuhan masyarakat Muslim akan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan anak didik yang selain berilmu pengetahuan yang tinggi sekaligus memiliki agama yang kuat, semakin meningkat.

Pengakuan kesederajatan antara madrasah dan sekolah oleh pemerintah diawali dengan SKB Tiga Menteri pada tahun 1950 dan menjadi semakin kukuh dengan adanya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990 sebagai penjelasan UUSPN 1989 yang salah satu point menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri Khas Agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah (Pasal 4 ayat 3) (Rahim, 2001 : 31).

Saat ini madrasah sebagai salah satu elemen pendidikan nasional sedang terus mengembangkan diri. Jika dilihat dari indikator kuantitatif madrasah tidak kalah bersaing dengan sekolah umum.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 31.485 MI/MTs dan 3.269 MA diseluruh wilayah provinsi di Inonesia, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan program pendataan terhadap 21.454 MI, 9.860 MTs, dan 2.900 MA, angka partisipasi kasar pada madrasah tingkat Ibtidaiyah mencapai 2.894.128 murid, pada tingkat Tsanawiyah mencapai 1.813.135 murid, dan tingkat Aliyah mencapai 525.596 murid pada tahun ajaran 1999-2000. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sumbangan madrasah terhadap mobilisasi pendidikan anak-anak usia sekolah secara nasional mencapai 10,1 % dari sekitar 27.454.191 anak usia 7-12 tahun, 12,8 % dari sekitar 14.145.659 anak usia 13-15 tahun, dan 4 % dari keseluruhan remaja usia 16-118 tahun.



Dibanding dengan tahun sebelumnya, perkembangan ini mengalami peningkatan sekitar 1,8 % untuk madrasah tingkat Ibtidaiyah dan 3,9 % untuk madrasah tingkat Tsanawiyah (Rahim, 2001 :13).

Namun secara kualitatif madrasah masih dianggap lebih rendah dari sekolah umum. Karena kemampuan ilmu eksakta output madrasah dibawah kemampuan output sekolah umum, sehingga ada anggapan bahwa madrasah bagus untuk pengembangan akhlak tetapi kurang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan akibatnya orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya disekolah umum karena dianggap lebih mudah untuk mengakses pekerjaan.

## **B. Tantangan Pendidikan di Madrasah**

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat dilihat bahwa masa depan pendidikan Islam ditentukan baik oleh faktor internal maupun eksternal (Rahim, 2001 :13). Oleh karena itu tantangan pendidikan di madrasah bisa digolongkan menjadi dua yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal.

### **1. Tantangan internal**

Tantangan internal yaitu tantangan yang berasal dari dalam pendidikan sendiri meliputi:

- a. Masalah perluasan pendidikan (demokrasi pendidikan)
- b. Kurikulum
- c. Tenaga kependidikan (Suryadi dan Tilaar, 1994 : 94 -101)

Serta menurut Zamroni :

- d. Drop out



e. Sumber daya pendidikan

Ad:

a. Demokrasi pendidikan

“Setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran” pernyataan ini bisa dilihat dalam UUD 1945 pasal 31. Hal itu menunjukkan bahwa dalam pendidikan di Indonesia terdapat sistem demokratis yang tidak diskriminatif dalam memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Idealisme konstitusional pendidikan di Indonesia juga berorientasi pada education for all, yakni pendidikan untuk seluruh manusia Indonesia tanpa kecuali ( Wahid, 1996 : 56).

Secara kuantitatif, pendidikan terus berkembang seiring perkembangan penduduk Indonesia. Artinya perluasan kesempatan pendidikan semakin merata sebagaimana data:

Jumlah murid pada tingkat SD meningkat dari 13.023.000 pada tahun 1967/1968 menjadi 29.239.238 dalam tahun 1997/1998, atau telah terjadi peningkatan sebesar 224,59 %. Dalam periode yang sama, murid SLTP telah meningkat dari 1.000.000 menjadi 9.227.891 atau terjadi peningkatan sebesar 902,30 %. Demikian pula pada tingkat SMTA, jumlah pendaftar telah meningkat dari 500.000 menjadi 4.932.083 atau meningkat sekitar 1000 %. Peningkatan yang berarti juga terjadi pada tingkat universitas. Dalam periode yang sama jumlah mahasiswa telah meningkat dari 230.000 menjadi 2.703.896 atau meningkat 1176 % ( Suyanto dan Hisyam, 2000 : 5 )

Angka partisipasi kasar pada madrasah ibtidaiyah mencapai 2.894.128 murid, pada tingkat Tsanawiyah mencapai



1.813.135 murid dan tingkat Aliyah mencapai 525.596 murid pada tahun ajaran 1999-2000. angka-angka itu menunjukkan bahwa sumbangan madrasah terhadap mobilisasi pendidikan anak-anak usia sekolah secara nasional mencapai 10,1% dari sekitar 27.454.191 anak usia 7-12 tahun, 12,8 % dari sekitar 14.145.659 anak usia 13-15 tahun, dan 4 % dari keseluruhan remaja usia 16-18 tahun. Dibanding sebelumnya, perkembangan ini mengalami peningkatan sekitar 1,8 % untuk madrasah tingkat Ibtidaiyah dan 3,9 % untuk madrasah tingkat Tsanawiyah (Rahim, 2001 : 13)

Tidak hanya jumlah partisipasi pendidikan yang mengalami peningkatan, jumlah lembaga pendidikan ( sekolah ) juga meningkat. Pada akhir 1994 ditemukan data bahwa jumlah SD sudah mencapai 150.921 buah, SLTP 18.876 buah, SLTA 12.180 buah, perguruan tinggi negeri 61 buah dan perguruan tinggi swasta diatas 1.000 buah (Soedijarto, 2000 : 29 ). Bahkan peranan masyarakat yang berbentuk yayasan nirlaba cukup tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Saat ini paling tidak yayasan – yayasan pendidikan yang ada dalam masyarakat telah mampu mendirikan sekolah dasar swasta sebanyak 10.120, SLTP dan SMU/ SMA sebanyak 57.554 dan perguruan tinggi swasta sebanyak 1.164 buah. ( Suyanto dan Hisyam, 2000 : 24 ).

Untuk madrasah dapat dilihat dari data berikut MI Negeri 1.025 ; MI Swasta 23.625 , MTs Negeri 853 ; MTs Swasta 7.547 dan MA Negeri 457 ; MA Swasta 2.701 (Rahim, 2001 : 109). Besarnya jumlah madrasah swasta ini berkaitan dengan sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya



pendidikan Islam; dimana peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah dan pesantren sangat besar.

Semua angka tersebut memang menggembarakan untuk sebuah proses demokrasi pendidikan, tetapi sekaligus memprihatinkan. Keprihatinan itu terutama kalau dilihat dari persoalan esensial, yaitu kualitas dari lembaga pendidikan, khususnya swasta. Sebagian besar dari lembaga pendidikan swasta justru memiliki kualitas yang belum sesuai dengan tujuan ideal penyelenggaraan lembaga yang bersangkutan. Persoalan yang sama juga terjadi pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya SD. Banyak madrasah dan SD yang terletak di pelosok – pelosok daerah tidak dapat berkembang bahkan terpaksa ditutup. Berbagai persoalan dari minimnya sarana, kecilnya angka partisipasi maupun kurangnya tenaga pengajar menjadi alasan terjadinya peristiwa tersebut.

b. Kurikulum

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang manapun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan, diperlukan kurikulum yang baik. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum.



Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang disusun pertama kali dalam periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada masa Repelita II. Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi kelemahan-kelemahan kurikulum 1968 baik dilihat dari pengorganisasian materinya, pendekatan belajar mengajarnya, sarana -prasarana maupun sistem pengelolaannya (Suryadi dan Tilaar, 1994 : 98).

Kurikulum 1975 dirasakan amat membengkak dan sangat gemuk disamping kurikulum tersebut dalam arti program terlalu berorientasi pada produk belajar, bukan proses belajar. Kemudian kurikulum itu direvisi lagi dengan munculnya kurikulum 1984 yang konon telah mementingkan proses belajar dan perampingan. Namun perampingan itu juga tidak tuntas (Suryadi dan Tilaar, 2000 : 62).

Perubahan-perubahan kurikulum tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki pendidikan jalur sekolah Indonesia. Penyempurnaan kurikulum terus dilakukan. Terbukti dengan lahirnya kurikulum 1994, "kurikulum 1994 merupakan separate subject curriculum yaitu kurikulum yang terdiri mata pelajaran yang terpisah-pisah dan berorientasi akademik"(Suderadjat, 2002 : 6).

Kehadiran kurikulum 1994 bukan berarti bahwa masalah untuk kurikulum di sekolah-sekolah telah berakhir. Kurikulum 1994 dipandang perlu untuk segera direformasi. Hal tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra.

Alasan yang menghendaki reformasi kurikulum 1994 adalah kurikulum ini tidak mampu lagi menjawab tantangan yang ada dan sudah tertinggal dari dinamika perubahan, apalagi sebentar lagi bangsa Indonesia akan memasuki kawasan pasar bebas, yang akan lebih mengutamakan kompetisi tentang kualitas SDM di tingkat internasional (Marzuki, 2000 : 32).



Data lain menyebutkan:

“Suatu diskusi panel menyatakan bahwa didalam kurikulum 1994 dapat diketahui bahwa hampir semua mata pelajaran pada kurikulum ini sangat berbasis materi yang dapat pula diartikan tidak berbasis atau tidak jelas berbasis pada tujuan-tujuan antara seperti yang seharusnya diturunkan oleh tujuan pendidikan nasional” (Nomida, 2000 : 72).

Kepadatan kurikulum 1994 menyebabkan peserta didik tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menelaah topik-topik bahasan yang diajarkan. Akibat lain yang muncul adalah guru cenderung dikejar untuk mengerjakan topik lain, dalam arti guru merasa lega kalau mengerjakan tugas sesuai dengan format yang ditentukan, yaitu menyelesaikan kurikulum tanpa peduli muridnya mengerti atau tidak (Marzuqi, 2000 : 32).

Masalah kurikulum memang tak akan pernah ada habisnya karena tidak ada kurikulum paten yang bisa digunakan sepanjang jaman tanpa revisi. Revisi kurikulum akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan masyarakat. Saat ini muncul apa yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini dipandang sangat bagus karena bersifat *student centered*. Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal
- 2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman



- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi
- 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Depdiknas, 2002 : 2)

Dalam konteks madrasah, agar lulusannya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, maka kurikulum madrasah perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hal itu dilakukan agar marasah secara kelembagaan dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan desentralisasi. Dengan cara seperti itu, mdrasah tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya (Depag, 2003 : 1).

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum berdiversifikasi. Sebagai kurikulum berdiversifikasi pada tataran implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sesuai dengan pola pengembangan daerah atau pemberdayaan potensi daerah.

Tetapi yang menjadi pertanyaan siapkah sekolah-sekolah di Indonesia menerapkannya, mengingat kemampuan sekolah di Indonesia tidaklah seragam, karena mengubah kurikulum bukanlah pekerjaan yang mudah. Praktek pendidikan di sekolah senantiasa jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan teori kurikulum. Bukan sesuatu yang aneh bila suatu teori kurikulum baru menjadi kenyataan setelah 50-75 tahun kemudian (Nasution, 1999 : 3).





c. Tenaga kependidikan

Setiap membicarakan tentang pendidikan formal, maka akan bersinggungan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam UU Sisdiknas Bab XI pasal 39 disebutkan bahwa

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (2003 : 27).

Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam pendidikan karena merekalah yang bertugas menyelenggarakan proses terjadinya pendidikan tersebut. Termasuk dalam komponen ini adalah tenaga Tata Usaha, Kepala Sekolah, pengawas sekolah, pustakawan, laborat dan yang lainnya.

Tenaga pendidik (guru) disebut-sebut sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Guru sebagai aktor sentral dalam pendidikan harus mampu menjalankan fungsinya sebagai intelektual dan sebagai pelaku sosial. Sebagai intelektual, guru dihadapkan pada ranah pendidikan yang inheren dengan kehendak dan teknisisme kurikulum, sedangkan sebagai pelaku sosial dihadapkan dengan realitas sosial, demokratisasi pendidikan serta kebebasan akademis (Abror, 2003 : 34).



Untuk dapat menjalankan kedua fungsi tersebut guru harus benar-benar memiliki kemampuan dan intelektual yang cukup. Dalam UU Sisdiknas pasal 42 disebutkan:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi (2003 : 29).

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa tidak semua orang dapat menjadi pengajar. Yang menjadi persoalan di Indonesia adalah apakah semua tenaga pengajar telah memenuhi persyaratan tersebut. Jika melihat dari banyaknya lembaga pendidikan guru serta banyaknya pengangguran dari output lembaga tersebut maka kesimpulan yang muncul adalah semua tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Indonesia telah memenuhi kualifikasi kewenangan mengajar. Tetapi pada kenyataannya,

Bila dilihat data guru madrasah saat ini, hampir 60 % guru madrasah negeri termasuk kategori tidak layak dan angka ini menjadi 80 % pada madrasah swasta. Sedangkan yang masuk layak tapi salah kamar sebanyak 20 % pada madrasah negeri, dan sisanya 20 % yang betul-betul layak dan cocok bidang studi yang diajarkan (Rahim, 2001 : 165).

Sementara untuk sekolah, mayoritas guru SD masih lulusan 6 tahun setelah lulusan SD, guru SLTP mayoritas masih lulusan PGSLP (D1 atau

D2) dan guru SLTA lebih dari 40% belum memiliki ijazah S 1” (Soedijarto, 2000 : 97).

d. Drop out

Drop out dan ulang kelas pada kelas yang sama dikategorikan sebagai tanda-tanda pendidikan tidak efisien. Sebab dengan drop out berarti tujuan pendidikan tidak tercapai sedangkan biaya pendidikan terlanjur sudah dikeluarkan (Zamroni, 2000 : 46).

Pemerintah dan masyarakat, sudah berusaha memecahkan masalah drop out. Misalnya dengan program Wajib Belajar 9 tahun dan sistem orang tua asuh. Hasilnya persentase drop out menurun tahun demi tahun. Hal ini dapat dilihat dari data drop out yang ditunjukkan H. A. R Tilaar:

	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94
SD	891,1	858,6	837,7	822,3	816,8
SMTP	211,8	194,2	194,2	134,5	138,9
SMTA	194,7	200,3	205,3	216,6	233,0

Penurunan tersebut merupakan prestasi, walaupun masih tetap dalam taraf yang mengawatirkan, karena “Sekitar 63% dari anak-anak yang memasuki SD tidak dapat menyelesaikannya” (Nasution, 2000 : 155-156).

Banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, antara lain alasan perekonomian keluarga, yaitu anak



diperlukan untuk membantu orang tua yang mencari nafkah. Ini banyak ditemui didaerah pedesaan. Hal ini terkait erat dengan kehidupan pedesaan dimana anak sejak dini sudah dilibatkan dalam pekerjaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan keluarga.

e. Sumber daya pendidikan

Menurut undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 point (23), Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana (2003 : 6).

Yang dimaksud dengan sarana pendidikan ialah, "Hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, khususnya disekolah-sekolah. Termasuk kedalam sarana pendidikan ialah : tanah, bangunan, perabot atau meubiler, perlengkapan dan perkakas pendidikan" (Supandi dan Rustana, 1992 : 155). Pendapat lain menyebutkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah :

1. Semua pribadi dan perbuatannya antara lain pendidik, guru, pembimbing, orang tua, orang dewasa yang sengaja difungsikan pada kegiatan mendidik
2. Semua situasi dan kondisi pendidikan yang secara intensional dan sistematis diadakan untuk mendukung perbuatan mendidik, ditujukan untuk memberikan pengaruh edukatif.
3. Segala macam lembaga, sistem peralatan dan alat-alat bantu yang sengaja diadakan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan (Kartono, 1992 : 252).



Berdasarkan semua penjelasan di atas yang dimaksud sumber daya pendidikan adalah : a) Tenaga pendidikan beserta perbuatannya, b) Dana, c) Sarana dalam bentuk benda fasilitas riil yang digunakan untuk proses pendidikan.

Sumber daya pendidikan khususnya sarana pendidikan memang masih menjadi problem di Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah pedalaman umumnya minim sarana pendidikan, misalnya dalam pengadaan buku, perpustakaan maupun fasilitas lain. Padahal dari penelitian disebutkan bahwa kelengkapan sarana prasarana mendukung prestasi belajar anak didik. Bahkan masyarakat memandang sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang berprestasi akademis dan memiliki sarana yang lengkap.

Menurut salah satu dewan pakar ICMI pusat :

Ciri sekolah yang mempunyai nilai tambah (kurikulum plus), biasanya telah memiliki gedung dan peralatan pendidikan yang lengkap, termasuk laboratorium baik laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa maupun komputer. Disamping itu sarana dan peralatan olahragapun lengkap pula, fasilitas perpustakaan yang memadai dan ruang baca yang representatif, mempunyai minimarket atau kantin (M. Saefuddin sebagaimana dikutip Mahfud, 2000 : 37).

Namun hal itu masih sulit diwujudkan, khususnya oleh sekolah-sekolah swasta didaerah. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan tersebut berkaitan dengan sumber daya pendidikan lain yaitu terbatasnya sumber dana.



## 2. Tantangan eksternal

Sejarah perkembangan pendidikan membuktikan bahwa kemajuan pendidikan menyertai kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi produksi. Kemajuan proses produksi mendorong kemajuan pendidikan, dan pada gilirannya kemajuan dalam bidang pendidikan akan mendorong pula kemajuan dan perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Hendrawijaya, 1995: 21).

Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lain yang terjadi diluar sistem pendidikan saling mempengaruhi. Pendidikan berfungsi mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam menjalankan fungsi dari berbagai diri berbagai bidang kehidupan tersebut. Berkaitan dengan fungsi tersebut, berjalannya sistem pendidikan tersebut tidak boleh lepas dari perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tantangan yang dihadapi pendidikan-dalam hal ini pendidikan formal-tidak semata-mata datang dari sistem pendidikan secara internal tetapi juga tantangan eksternal atau tantangan yang berasal dari luar sistem pendidikan. Tantangan eksternal ini dibagi menjadi dua yaitu tantangan kecenderungan global dan tantangan kecenderungan nasional.

### a. Tantangan Kecenderungan Global

Pada abad XXI kehidupan manusia tidak hanya memiliki dimensi domestik tetapi global. Proses globalisasi merupakan kata kunci yang



mengandung banyak makna. Faktor pendorong utama proses ini antara lain kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi telah membatasi batas-batas yang mengisolasi manusia. Lahirlah apa yang disebut manusia terbuka (*open society*) dimana terjadi aliran bebas informasi, manusia, perdagangan dan bentuk-bentuk dari aktifitas kehidupan global lainnya yang menyatukan umat manusia (Tilaar, 2000 : 146).

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua bangsa, termasuk Indonesia yang tidak mungkin dihindari dengan segala berkah dan muhorotnya. Kehawatiran, kecemasan atau bahkan ketakutan akan pengaruh negatif dari globalisasi umumnya dirasakan terutama oleh bangsa-bangsa dalam negara berkembang, yang lebih merupakan objek daripada subjek globalisasi (Djiwandono, 2000 : 103).

Tetapi globalisasi akan tetap berlangsung, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini. Globalisasi menyebabkan tingkat kompetitif global yang sangat besar. Artinya, siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas global akan tersingkir secara alami.

Bidang pendidikan masih menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan SDM Indonesia. Madrasah tidak mungkin menisbikan proses globalisasi. Untuk dapat menghasilkan manusia-manusia yang kompetitif, sekolah harus terus memantapkan keberadaannya. Karena kualitas SDM Indonesia masih sangat rendah. Menurut laporan UNDP, peringkat HDI Indonesia



adalah 102, sementara, "Beberapa negara tetangga kita yang termasuk anggota ASEAN, mempunyai peringkat HDI sebagai berikut, Singapura berada pada tingkat 34, Brunai Darussalam 36, Thailand 52, Malaysia berada pada peringkat 53" (Suyanto dan Hisyam, 2000 : 4).

Gambaran tersebut memang memprihatinkan. Jika pada tingkat regional saja sudah kesulitan bersaing, bagaimana menghadapi kompetisi global. Maka menjadi suatu keharusan bagi madrasah/sekolah untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan global.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad ini berlangsung sangat cepat, terutama bertumpu pada tiga bidang, yaitu bio teknologi, material science atau teknologi bahan dan teknologi elektronika dan komputer. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pada dunia industri. Industri-industri yang menggunakan teknologi maju semakin meningkat menggantikan sebagian kegiatan industri tradisional.

Perubahan teknologi pada umumnya meliputi empat tahap pokok yang harus dilalui oleh semua negara menuju masyarakat industri. Tahap-tahap tersebut meliputi: (1) Pendayagunaan teknologi yang masih tersedia untuk tujuan meningkatkan nilai tambah, sementara itu teknologi baru dalam industri pengolahan barang-barang jadi yang sekarang terjual di pasar mulai dikenalkan, (2) Pemaduan teknologi yang tersedia dalam mengolah hasil-hasil industri baru, (3) Pengembangan dan peningkatan teknologi, sementara teknologi yang tersedia mulai ditingkatkan dan, (4) Pengembangan kemampuan penelitian dasar yang memungkinkan negara melahirkan berbagai bentuk penemuan dan pengembangan teknologi baru (Suryadi dan Tilaar, 1994 : 88).

Perubahan akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam proses perubahan tersebut.

Sekolah sebagai lembaga yang harus berhadapan langsung dengan sebagian besar penduduk Indonesia mau tidak mau harus bersenyawa dengan perkembangan IPTEK. Sekolah setidaknya dapat menjadi sebuah lembaga yang mampu mengenalkan teknologi kepada peserta didiknya, terlebih lembaga sekolah Islam karena umat Islam telah diperintahkan Allah untuk mengkaji teknologi sebagaimana ayat :

الم يرو الى الطير مسخرت في جوالسمااء ط مايمسكهن الاالله ط

ان في ذلك لايت لقوم يؤمنون

Artinya : “Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman” (An Nahl : 79) (Depag RI, 1980 : 413).

Ayat diatas merupakan dasar perintah bagi manusia untuk mengkaji teknologi. Sekolah sebagai lembaga yang mempersiapkan manusia untuk menghadapi dunianya-pun tidak bisa menafikan hal tersebut. Jika tidak



sekolah akan menjadi sebuah lembaga yang hanya sanggup menyiapkan manusia bertaraf lokal. Padahal, pada abad ini manusia Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan kompetisi lokal tetapi global. Hal itu mungkin akan sulit, karena berbeda dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh masyarakat yang begitu cepat, sebaliknya “Dunia pendidikan tidak dapat dengan mudah mengikuti perkembangan teknologi di masyarakat ...” (Suyanto dan Hisyam, 2000 : 17). Hal itu terkait dengan banyaknya unsur dalam dunia pendidikan khususnya sekolah.

Perkembangan IPTEK ditandai dengan kemudahan mengakses informasi. Kemudahan tersebut disebabkan berkembangnya dunia elektronika seperti televisi, radio dan khususnya komputer. Kemampuan IPTEK dan akses informasi menyebabkan membanjirnya informasi yang diterima manusia. Anak-anakpun dibanjiri segala jenis informasi lewat media-media elektronika tersebut. Maka menjadi tugas sekolah untuk menjadi media filter bagi anak dalam memanfaatkan informasi tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diikuti perkembangan pada dunia perekonomian.

Pada Abad 21 ini diperkirakan bahwa kepentingan ekonomi akan lebih menentukan hubungan antarbangsa dibandingkan dengan kepentingan politik sebagai akibat dari keinginan negara-negara maju untuk melindungi kepentingannya melalui kebijakan proteksionisme serta monopoli dalam bidang teknologi (Suryadi dan Tilaar, 1998: 87).



Di bidang ekonomi, berjalan apa yang dinamakan pasar bebas. Pasar bebas ini ditandai dengan pelaksanaan AFTA dan AFLA.

Secara internasional tahun 2003 AFTA (Asean Free Trade Area) dan AFLA (Asean Free Labour Area) akan dimulai, yang berarti sejak saat itu persaingan tenaga kerja akan menjadi terbuka. Konsekuensinya tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Jika tidak, maka tenaga kerja kita akan tersisihkan oleh tenaga kerja asing dari negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Bangladesh dan India (Suderadjat, 2000 : 3).

Padahal selama ini tenaga kerja Indonesia belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

b. Tantangan Kecenderungan Nasional

Saat ini di Indonesia sedang terjadi beberapa perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan nasional. Hal itu antara lain:

1) Otonomi Daerah

Saat ini dinegara kita sedang bergulir otonomi daerah. Dengan terbitnya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999 maka dimulailah salah satu rentetan proses demokrasi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam UU No.22 tahun 1999 pasal 1 (h) disebutkan bahwa otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan pada point (i) bahwa yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu,



berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (Tholhah, 2000 :36)

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah (khususnya tingkat II) untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara, sehingga independen memanage sumber dayanya sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. “Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah yang luas sebagai manifestasi pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik kearah sistem pemerintahan yang bercorak desentralistik (Hadi, 2002 : 1). Hal itu sesuai dengan yang diisyaratkan Allah dalam ayat :

قل يقوم اعمالوا على مكانتكم انى عمل<sup>ط</sup> فسوف تعلمون

(الزمر : ٢٩)

Artinya : “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu ...” (Az Zumar, 39)(Depag RI, 1980: 751).

Tiap keadaan mempunyai masalah dan tantangan berbeda. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda pula, maka sentralisasi kebijakan dalam segala bidang tidaklah sesuai. Otonomi daerah merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah. “Desentralisasi kekuasaan kepada daerah otonom merupakan prakondisi bagi demokrasi, supremasi hukum,

juga penghormatan kepada budaya lokal untuk menjamin pluralisme budaya dan mendorong integrasi nasional” (Hadi, 2002: 1).

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, memberikan implikasi terhadap dunia pendidikan nasional. Secara politis diterapkannya UU No.22 Tahun 1999, maka kekuasaan yang sangat strategis berada pada Kepala Daerah Tk II, karena mereka diberikan keleluasaan wewenang untuk membangun dan mengembangkan wilayah dan sumberdaya yang dimilikinya, sebagaimana pasal 7 undang-undang tersebut yang dikutip dalam tulisan “Otonomi Daerah dan Problem Pendidikan” di Mimbar Pembangunan Agama No. 163/ April 2000 :

Ayat (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lain (Tholhah, 2000: 36).

Secara implisit, pendidikan nasional tidak disinggung, tetapi includ dalam term pemberdayaan sumber daya nasional. Dengan adanya desentralisasi dibidang pendidikan, maka pendidikan akan berwawasan *grassroot* (tumbuh dari bawah).

Tetapi otonomi dan desentralisasi juga akan menimbulkan problem baru dalam bidang pendidikan, karena setiap daerah mempunyai perbedaan yang cukup signifikan baik SDM maupun SDA-nya. Problem tersebut dapat berupa pendanaan dan sistem pengembangan. Hal itu bisa



terjadi didaerah-daerah yang manapun jika SDM dan SDA yang dijadikan modal utama sangat terbatas. Hal itu dapat dijadikan acuan dengan mengingat secara kualitatif SDM Indonesia pada tataran nasional masih tergolong rendah dibanding dengan negara-negara Asia, sehingga akan menghambat pengembangan pendidikan di daerah dan pendidikan nasional secara makro. Hal kedua yang menjadi problem adalah sistem pendanaan. Diketahui bahwa hampir sebagian besar daerah belum mandiri.

## 2) Masalah Moralitas

Sejak dua dasawarsa terakhir, kalangan pelajar mulai mengalami erosi moral. Hingga saat ini ada tiga pelanggaran moral yang menjangkiti kehidupan para pelajar di tanah air, yaitu tawuran, konsumsi narkoba atau minuman keras dan seks pra-nikah. Fenomena tawuran antar pelajar senantiasa menjadi pemberitaan. Begitu juga seks pra-nikah. "Pada tahun 1992 hasil penelitian Bappekar menunjukkan bahwa 42% siswa SMTA di Jatim telah melakukan hubungan seks pra- nikah (Manan, 1999: 35).

Lebih lanjut, Yayasan Duta Awan Semarang pada bulan November 1996 sampai Maret 1997 telah mensurvei 500 anak-anak remaja di Semarang. Dari hasil survei ini diperoleh data yang cukup memprihatinkan. Misalnya 12,9 persen dari mereka pernah melakukan hubungan seksual lebih dari delapan kali perbulan, 48,4 persen melakukan tetapi tidak rutin ... (Wiloyudho sebagaimana dikutip Ghazali, 2000 : 41-42).

Begitu juga masalah narkoba dan minuman keras mulai merambah pelajar dan sekolah. Bahkan peredaran narkoba mulai menyentuh sekolah lanjutan tingkat pertama.

Gambaran tersebut cukup untuk melukiskan terjadinya degradasi moral dan akhlak masyarakat khususnya peserta didik. Padahal kita tahu moral dan akhlak merupakan hal penting yang harus ditanamkan dalam diri manusia sebagai parameter kualitas dirinya. Sebagaimana firman Allah:

... ان اكرمكم عند الله اتقكم... (الحجرات : ١٣)

Artinya : "... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu..." (Qs. Al hujurat : 13) (Depag RI, 1981 : 847)

Serta hadits Nabi:

انما بعثت لاتمما صالح الاخلاق

Artinya : "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. (Sahih. Riwayat Ibnu Sa'd, Bukhari di Al Adab, Hakim dan Baihaqidi Syu'abul Iman dari Abu Hurairah) (1990: 160).



Sementara hal itu dituding sebagai kegagalan institusi pendidikan dalam melakukan internalisasi nilai kepada peserta didiknya. Walaupun sebenarnya kondisi kebobrokan moral bukanlah semata-mata kesalahan sekolah, karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya ada pada sekolah tetapi juga keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan.

### **BAB III**

#### **HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Obyek Penelitian**

Kecamatan Pujer termasuk dalam Kabupaten Bondowoso. Terletak di tenggara ibukota kabupaten kurang lebih 12 Km dengan batas wilayah sebelah utara : kecamatan Tenggarang dan Wonosari, sebelah timur : kecamatan Tlogosari, sebelah selatan : kecamatan Sumberjambe (Kabupaten Jember), sebelah barat kecamatan Tamanan dan Tenggarang. Luas wilayah kecamatan ini kurang lebih 4.236.900 Ha, terbagi menjadi 11 desa yaitu Desa Alas Sumur, Kejayan, Mangli, Maskuning Kulon, Maskuning wetan, Mengok, Padasan, Pengarang, Randu Cangkring, Sukokerto, Sukowono. Jumlah penduduknya 39.155 jiwa (Dokumen kecamatan Pujer, 2003). Kecamatan Pujer memiliki 54 lembaga pendidikan jalur sekolah yang terdiri dari 30 sekolah dasar, 9 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SLTP dan 4 Madrasah Tsanawiyah.

4 Madrasah Tsanawiyah yang merupakan obyek penelitian dalam skripsi ini berstatus swasta, yaitu:

1. MTs Al Barokah berlokasi di desa Padasan

Sekolah ini berada dibawah koordinasi Yayasan Pesantren Al Barokah.

2. MTs Al Ma'arif berlokasi di desa Maskuning Wetan

Sekolah ini berada dibawah koordinasi PBNU Cabang Pujer.



3. MTs Bustanul Ulum berlokasi di desa Padasan

Sekolah ini berada dibawah koordinasi Yayasan Pesantren Bustanul Ulum.

4. MTs Zainal Abidin berlokasi didesa Kejayan

Sekolah ini berada dibawah koordinasi Yayasan Pesantren Zainal Abidin.

## B. Deskripsi Data

Sekolah adalah sebuah masyarakat kecil (mini society) yang merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta harapan masyarakat untuk memperoleh perbaikan hidup. Untuk mempertahankan eksistensinya sekolah/madrasah tidak mungkin mengabaikan masalah disekitarnya. Situasi yang terjadi di luar lingkup sekolah seringkali merupakan tantangan bagi pengembangan dan perbaikan bagi sekolah itu sendiri. Pengembangan menuju kualitas yang baik tidaklah datang dengan sendirinya, tetapi perlu adanya “rekayasa”, seperti yang diisyaratkan Allah dalam ayat :

...ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ط... (الرعد : ١١)

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (Ar Ra’du : 11) (Depag RI, 1980: 370).

Salah satu upaya maksimal untuk menghasilkan rekayasa maksimal adalah dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi MTs swasta. Tantangan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer adalah:

## 1. Tantangan Internal Pendidikan MTs swasta

Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan dirinya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, ia harus mampu menemukan dan mengantisipasi kekurangan-kekurangan dalam dirinya.

### a. Demokratisasi Pendidikan

Secara kuantitatif, demokrasi pendidikan dapat dilihat dari statistik siswa yang bersekolah serta tingkat pendidikan masyarakatnya. Jumlah anak bersekolah di kecamatan Pujer seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

SEKOLAH	Tahun	
	Pelajaran 2001-2002	Pelajaran 2002-2003
1. MTs Al Barokah	83	90
2. MTs Al Ma'arif	40	56
3. MTs Bustanul Ulum	39	39
4. MTs Zainal Abidin	73	73
Jumlah	235	258

Sumber : diolah dari dokumen-dokumen MTs Al Ma'arif, MTs Al Barokah, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin

Sekedar perbandingan, jumlah siswa yang bersekolah di SMPN 1 Pujer berjumlah 286 siswa, artinya 47,4 % siswa tingkat menengah pertama di



Pujer merupakan siswa MTs swasta, sementara 52,6 % merupakan siswa sekolah umum negeri. Hal ini menunjukkan bahwa MTs swasta masih kalah bersaing dibanding dengan sekolah umum yang hanya satu di Pujer.

**b. Kurikulum dan Program Pendidikan**

Kurikulum yang dipakai sekolah di Pujer pada umumnya sama, yaitu kurikulum 1994 yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan Agama terdiri dari :
  - a) Fiqih
  - b) Aqidah Akhlak
  - c) Bahasa Arab
  - d) Sejarah Kebudayaan Islam
  - e) Al Qur'an Hadits
- 2) PPKN
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) Matematika
- 5) IPA meliputi :
  - a) Biologi
  - b) Fisika
- 6) IPS meliputi :

- a) Geografi
  - b) Sejarah
  - c) Ekonomi
- 7) Bahasa Inggris
  - 8) Kertakes
  - 9) Pendidikan jasmani
  - 10) Muatan lokal

Selain itu 4 MTs tersebut memiliki kurikulum khas yaitu bidang studi Aswaja (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah), hal itu terkait dengan karakteristik pengelola yayasan yang berbasis NU. Salah satu sekolah yaitu MTs Zainal Abidin bahkan menambahkan beberapa bidang studi keagamaan. "Disamping melaksanakan kurikulum dari Depag, MTs Zainal Abidin juga memasukkan visi dan misi yayasan dalam kurikulum dengan menambahkan beberapa bidang studi seperti Ushul Fiqh, ilmu Kalam dan lain-lain" ( Rofi'i, wawancara , 26/4/2003, jam 09.20 WIB ). Kurikulum MTs Zainal Abidin disesuaikan dengan kurikulum pesantren.

Program pendidikan sebagai bagian dari kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan dan kelembagaan haruslah di rancang dengan cermat. Program-program untuk pendidikan jalur sekolah di Pujer antara lain:



a) Kegiatan Belajar Mengajar

(1) MTs Al Barokah

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan dari pukul 07.00-11.15 WIB. Kegiatan belajar mengajar di MTs Al Barokah memang belum dapat dilaksanakan seperti sekolah lain yang berakhir pukul 13.15 WIB, karena gedung mereka pada siang harinya dipakai untuk MI. Dalam satu minggu hari belajar efektif selama lima hari dan Jum'at sebagai hari libur.

(2) MTs Al Ma'arif

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan dari pukul 07.00-13.15 menetapkan libur setiap hari Ahad. Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar semua sekolah menetapkan guru piket, hal itu untuk mengantisipasi apabila ada guru pengajar yang tidak datang.

(3) MTs Bustanul Ulum

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan dari pukul 07.00-13.15 menetapkan libur setiap hari Jum'at. Walaupun tidak ada guru piket tetapi selalu ada guru yang siap menggantikan guru yang tidak bisa hadir, menurut salah satu guru, " Disini tidak ada guru piket, tetapi saya dan beberapa guru lain selalu stand by setiap hari walaupun tidak ada waktu mengajar. Sehingga sewaktu-

waktu ada guru yang tidak hadir sudah ada guru pengganti”  
(Munawir, wawancara, 23/4/2003, jam 10.40 WIB).

(4) MTs Zainal Abidin

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan dari pukul 07.00-13.15 menetapkan libur setiap hari Ahad. Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar semua sekolah menetapkan guru piket, hal itu untuk mengantisipasi apabila ada guru pengajar yang tidak datang. (Drs Rofi'i, wawancara, 26/4/2003, jam 10.10 WIB).

Dari hasil pengamatan peneliti, ketidakhadiran guru pengajar sering terjadi pada semua MTs swasta di Pujer.

b) Kegiatan Ekstra Kurikuler

Semua MTs swasta di Pujer memiliki program ekstra kurikuler.

(1) MTs Al Ma'arif, program ekstra kurikuler:

- Keagamaan (baca kitab dan pembinaan kultum)

(2) MTs Bustanul Ulum, program ekstra kurikuler:

- Pramuka

(3) MTs Al Barokah, program kurikuler:

- Keagamaan
- Olahraga



(4) MTs Zainal Abidin, program ekstra kurikulumnya:

– Pramuka

Ekstra kurikuler ini dimaksudkan untuk membina mental dan kemampuan anak, diungkapkan oleh salah satu pengajar MTs Al Barokah: "Setiap hari rabu anak-anak wajib mengikuti pembinaan kulture, yang nantinya dipraktekkan langsung setiap sholat shubuh" (Zainullah, wawancara, 17/4/2003, jam 09.00 WIB). Selain itu semua sekolah menyatakan selalu melaksanakan peringatan hari besar agama Islam, seperti Maulid Nabi, Isro' Mi'roj dan lain-lain. MTs Zainal Abidin bahkan mempunyai pengajian rutin sebulan sekali yang harus diikuti oleh semua jajaran sekolah tersebut, baik tenaga kependidikan maupun peserta didik dan pihak yayasan.

c) Efektifitas perpustakaan

Membaca merupakan salah satu metode belajar. Dengan membaca, wawasan akan bertambah. Dari data yang diperoleh, di Pujer tidak ada satu MTs swastapun yang mempunyai fasilitas perpustakaan sekolah.

Tetapi MTs Al Barokah memanfaatkan perpustakaan yayasan sebagai sarana bacaan peserta didiknya, karena belum memiliki perpustakaan sendiri. Setiap hari Jum'at semua peserta didik diwajibkan membaca ataupun meminjam buku. MTs Bustanul Ulum ,

menggunakan jasa perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bondowoso untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semua peserta didik dan tenaga pengajar terdaftar di perpustakaan tersebut.

c. Tenaga Kependidikan

Dari penelitian diperoleh data tenaga kependidikan di MTs swasta di Puger untuk sekolah lanjutan pertama sebagai berikut :

1) MTs Al Ma'arif

No	Nama	Pendidikan Akhir	Bidang Studi
1.	Dwi Panji Edy. K, S. Ag.	S1/IAI Ibrahim	SKI
2.	Drs. Santoso	S1/IKIP	Aswaja
3.	Mukhtar Roqib, S.PdI	S1/UIJ	PPKn
4.	Sri wahyuni, SE.	S1/UNISMA	Ekonomi
5.	Suhartono, S.Ag	S1/STAIN	SKI
6.	Rusyidi, S.Ag	S1/STAI ZH	Qur'an Hadits
7.	Anwar Syadad, S.Ag	S1/UNIBO	Bahasa Inggris
8.	Achmad Bandi, S.PdI	S1/UNIBO	Sejarah
9.	Anshari Hadi, A.Ma	D2/DEPAG	Aqidah Akhlak
10.	Indahyani S, S.PdI	S1/STAI	Geografi
11.	Sari F.S.	D3/Unej	Matematika
12.	Ummi Fadlilah, S.PdI	S1/UNIBO	Fiqih
13.	M. Asy'ari Yazid	SMU	Bahasa Arab
14.	Zaini	SMU	Biologi
15.	Heryanto	SMU	Bahasa Indonesia
16.	Munir A	SMU	Bhs daerah/KTK
17.	Moh. Arsun	SMU	Fisika

Sumber : dokumen MTs Al MA'arif



## 2) MTs Bustanul Ulum

No	Nama	Pendidikan Akhir	Bidang studi
1.	Drs. Santoso	S1/IKIP	PPKn
2.	Suwandi, S.Pd	S1/IKIP	Fisika
3.	Ahmad Juwandi, S.Pd	S1/UNIBO	Aswaja
4.	Drs. M. Rofi'i	S1/IAIN	Ekonomi
5.	Abdur Rahman, A.MA	S1/PAJ	Bahasa Inggris
6.	Anshori	D2/PAI	Fiqih
7.	Yayuk Astutik	D2/PAI	Kertakes
8.	M. Syaifullah	D2	Bahasa Inggris
9.	Muti'ah	D2	Bahasa Indonesia
10.	Abdul Rosyid	MA Nurul Jadid	SKI
11.	Ahmad Taufiq	SMA	IPS
12.	Munawir	SMA	Penjaskes
13.	M. Rusli Muzaqqi	SMU/Muallimin	Bahasa Arab
14.	Sudjito	MA/Muallimin	Aqidah Akhlak
15.	Mustajab	SMU	Matematika
16.	M. Syaifullah	SMU	Tata Usaha
17.	Abdul Halim	MA	Qur'an Hadits
18.	Usnadi	MA	Biologi

Sumber : dokumen MTs Bustanul Ulum

Secara keseluruhan tenaga kependidikan di MTs swasta kecamatan Puger tergambar pada tabel berikut :

Nama Sekolah	Tenaga Education		Pendidikan Akhir	
	Pengajar	TU	SMU/D1/D2	D3/S1
1. MTs Zainal Abidin	11	1	3	9
2. MTs Al Barokah	15	1	8	8
3. MTs Al Ma'arif	16	1	6	11
4. MTs Bustanul Ulum	17	1	13	5
Jumlah	59	4	30	34

Sumber : diolah dari dokumen MTs Al MA'arif, MTs Al Barokah, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin

Data diatas menunjukkan bahwa dari 63 tenaga kependidikan di puger 49,2 % berpendidikan SMU, D1 dan D2, sementara 50,8 % berpendidikan, D3 dan S1.

Bila proses perekrutan tenaga kependidikan disekolah negeri adalah melalui Pemerintah Daerah, tidak demikian untuk sekolah swasta, rekrutmen dilakukan oleh pihak yayasan dan sekolah sendiri. Secara umum syarat yang diajukan bagi calon tenaga kependidikan untuk MTs swasta di Puger adalah :

- a) Memiliki wawasan keislaman
- b) Bersedia dan mampu melakukan kegiatan belajar mengajar bagi tenaga pengajar
- c) Bersedia dan mampu mengajar serta menguasai ilmu administrasi bagi tenaga TU



- d) Mampu bekerja sama dengan sesama tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar.

Selain syarat diatas MTs swasta di puger mengajukan standar yang harus dimiliki untuk menjadi tenaga kependidikan di lembaga mereka.

(1) MTs Al Barokah

- Berijazah minimal muallimin;
- 6 bulan berstatus GP (Guru Persiapan);
- menguasai perangkat pembelajaran

(2) MTs Al Ma'arif

- memiliki ijazah keguruan
- memiliki 3 kemampuan bidang studi yaitu bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Al Qur'an Hadits bagi TU karena harus dapat merangkap sebagai pengajar atau setidaknya dapat menjadi pengajar pengganti (Edi, wawancara, 21/4/2003, jam 10.10 WIB).

(3) MTs Bustanul Ulum

- Berijazah keguruan
- 2 tahun dalam masa guru percobaan

(4) MTs Zainal Abidin

- Berijazah keguruan

Tetapi kendala yang dihadapi MTs swasta di Puger adalah standar yang ditetapkan dalam proses perekrutan tenaga kependidikan di lembaga mereka tidak dapat di penuhi berkaitan dengan kompensasi yang

diberikan. Selain itu tenaga-tenaga kependidikan MTs swasta di Pujer, tidak hanya menjadi tenaga pendidikan di satu lembaga, umumnya mereka merangkap sebagai tenaga pendidikan disekolah lain.

d. Drop Out (DO)

Masalah klasik yang hingga saat ini dihadapi lembaga jalur sekolah, khususnya didaerah adalah masalah drop out. Di Pujer pada tahun pelajaran 2002-2003 dari 253 peserta didik ada 25 yang drop out atau sebesar 9,9 % dengan data sebagai berikut:

SEKOLAH	SISWA DO
1. MTs Al Barokah	14
2. MTs Al Ma'arif	3
3. MTs Bustanul Ulum	3
4. MTs Zainal Abidin	5
JUMLAH	25

Sumber: diolah dari dokumen MTs Al MA'arif, MTs Al Barokah, MTs Bustanul Ulum dan MTs Zainal Abidin

Menurut guru MTs Bustanul Ulum penyebab drop out tersebut adalah masalah ekonomi dan menikah muda. "Alasan terjadinya drop out ini adalah masalah ekonomi, orang tua merasa tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Tetapi alasan terbesarnya justru anak terpaksa putus sekolah karena harus menikah" (Zainullah, wawancara, 17/4/2003, Jam 08.45 WIB).



e. Sumber Daya Pendidikan

Penelitian ini menghasilkan data tentang sumber daya pendidikan di

Pujer sebagai berikut:

- 1) Sarana dan prasarana
  - a) MTs Al Barokah
    - 3 ruang kelas
    - Koperasi
    - Mushola
    - Ruang Kepala Sekolah, guru dan TU
  - b) MTs Al Ma'arif
    - 3 ruang kelas
    - Ruang Kepala Sekolah, guru dan TU
    - Mushola
  - c) MTs Bustanul Ulum
    - 3 ruang kelas
    - ruang Kepala Sekolah dan TU
    - ruang guru
    - Mushola
  - d) MTs Zainal Abidin
    - 3 ruang kelas yang masing-masing tersekat menjadi dua bagian

- Ruang Kepala Sekolah, guru dan TU
- Masjid yayasan

## 2) Pendanaan

Dari penelitian ini didapatkan data bahwa:

- a) **MTs Al Barokah**, pengelolaan dana bersifat sentralistik, dimana semua dana dikelola langsung oleh yayasan. Dana tersebut bersumber dari pembayaran BP<sub>3</sub> siswa, dari yayasan, imbal swadaya dari Depag dan dari kerjasama dengan Gudang Garam melalui koperasi.
- b) **MTs Al Ma'arif**, sumber dana sekolah ini adalah BP<sub>3</sub> siswa dan dari yayasan.
- c) **MTs Bustanul Ulum**, pendanaan di sekolah ini di kelola oleh sekolah sendiri tidak melalui yayasan, dengan sumber dana : BP<sub>3</sub> siswa, dari donatur , dari yayasan.
- d) **MTs Zainal Abidin**, sumber dana sekolah ini adalah BP<sub>3</sub> dan dari yayasan. Tetapi BP<sub>3</sub> sebagai sumber dana masih belum berjalan lancar.

## 2. Tantangan eksternal pendidikan di MTs swasta

Pendidikan secara terus menerus dipertanyakan dan dipermasalahkan, sebab berkaitan dengan membentuk manusia. Hal itu akan selalu bervariasi sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat tertentu. Apabila pendidikan



dihadapi dengan statis maka akan dirasakan sebagai suatu pendidikan yang monoton. Padahal pendidikan akan selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.. Dari penelitian ini didapatkan data tantangan eksternal pendidikan jalur sekolah di Pujer adalah :

a. Tantangan kecenderungan global

Kehidupan umat manusia dalam milenium yang baru mempunyai dimensi bukan hanya domestik tetapi global. Kita hidup didalam dunia yang terbuka, dunia tanpa batas. Oleh karena itu kehidupan global bukan hanya merupakan tantangan tetapi juga membuka peluang-peluang baru didalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan jalur sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan dan peluang kehidupan global.

Kehidupan global ditandai dengan kemajuan IPTEK yang sangat pesat. Lihat saja siklus hidup produk industri semakin singkat. Apabila kemajuan IPTEK ini tidak diikuti maka kehidupan masyarakat tersebut akan semakin tersisih dan menjauh dari kualitas hidup yang diidamkan (Tilaar, 1999 : 252). Kemajuan Iptek diikuti dengan revolusi informasi yang akan membatat sekat-sekat kehidupan masyarakat manusia. Sejalan dengan revolusi informasi ini terjadi perubahan tata nilai yang sangat cepat.

Disamping masalah tersebut, perkembangan IPTEK dan revolusi informasi menyebabkan informasi yang diterima menjadi cepat usang. Untuk mengantisipasi dibutuhkan kemampuan manusia yang mampu meniasati teknologi dan informasi. Maka tidaklah berlebihan jika pendidikan formal diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut, mengingat pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diminati masyarakat.

Diperlukan beberapa antisipasi oleh sekolah dalam menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan IPTEK ini.

Kehidupan global selain ditandai dengan kemajuan teknologi juga perdagangan bebas. Perdagangan bebas dalam perekonomian dunia memberikan kesempatan-kesempatan baru tetapi juga tantangan-tantangan yang semakin sulit dan kompleks, sehingga meminta kualitas sumber daya manusia yang bukan saja menguasai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga terampil.

Perkembangan ekonomi internasional memang tidak secara langsung mempengaruhi dunia formal. Tetapi pendidikan formal yang berhadapan langsung dengan peserta didik harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai. Untuk mencapai semua itu diperlukan program-program yang relevan.



Program di sekolah-sekolah di kecamatan Pujer yang diproyeksikan untuk membentuk peserta didik yang siap mental dan bernilai ekonomis saat lulus dari pendidikannya adalah :

1) MTs Bustanul Ulum

Untuk mengasah keterampilan peserta didiknya, MTs Bustanul Ulum merancang program kelompok keterampilan elektronika dan perbengkelan, tetapi menurut guru sekaligus Kepala Sekolah program ini belum dapat direalisasikan, “ Program ini membutuhkan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Saat ini kami sedang mempersiapkan tenaga pengajar untuk mengasah ilmunya. Kendalanya adalah biaya, dibutuhkan dana cukup untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan”. (Drs Santoso, wawancara, 25/4/2003, Jam 10.20 WIB)

2) MTs Zainal Abidin

Program yang dilaksanakan adalah keterampilan komputer. Targetnya adalah membekali siswa dengan keterampilan khusus dan membentuk siswa yang tidak canggung teknologi. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya komputer yang tersedia yaitu 2 komputer sehingga pencapaian target menjadi kurang maksimal.

Sementara untuk sekolah yang lain belum memiliki program nyata dalam mengantisipasi perkembangan IPTEK ini.

b. Tantangan kecenderungan nasional

1) Otonomi daerah

Otonomi amat identik dengan proses pendewasaan bangsa di mana organ-organ yang lebih kecil akan mempunyai independensi yang cukup tinggi, yang harus dikonteskan dengan kondisi daerah. Otonomi daerah ini berimplikasi pada adanya otonomi pendidikan dalam arti bahwa setiap lembaga pendidikan diberi hak kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku. Namun yang menjadi persoalan adalah sampai sejauh mana kesiapan sekolah melaksanakannya, karena hal tersebut terkait dengan kesiapan daerah.

Otonomi daerah juga berimplikasi pada semakin luasnya porsi masyarakat untuk berpartisipasi pada pendidikan, dan itu juga berarti semakin luasnya kebebasan sekolah untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang dianggap berpotensi untuk perkembangan lembaganya. Berikut data dari sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama di Puger mengenai pengaruh otonomi terhadap lembaga mereka.

a) MTs al Barokah

(1) Segi pendanaan



Seperti yang terjadi di MTs Al Ma'arif, menurut Bapak Halili, masalah pendanaan tidak terpengaruh oleh berlakunya otonomi.

(2) Segi pembelajaran

Setiap ada perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan umumnya diikuti dengan perubahan kurikulum dan hal ini menurut mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, karena perubahan kurikulum yang berkali-kali membuat bingung pihak penyelenggara pendidikan, khususnya guru (Halili, wawancara, 7/4/2003, Jam 09.30 WIB)

(3) Segi kemitraan dengan masyarakat

Untuk mengakomodir kerjasama madrasah dengan pihak diluar pendidikan maka dibentuk Dewan Madrasah yang beranggotakan pihak guru, wali murid, perangkat desa dan pihak yayasan dan masyarakat sekitar. Peranan Dewan Madrasah pengumpulan dana insidental, melaksanakan hari besar Islam (Zainullah, wawancara, 22/4/2003, jam 09.00 WIB).

b) MTs Al Ma'arif

(1) Segi pendanaan

Tidak ada pengaruh berarti terhadap pendanaan sekolah tersebut, karena pada dasarnya sekolah swasta telah mandiri

dalam pembiayaan sejak sebelum otonomi diberlakukan (Heryanto, wawancara, 21/4/2003, jam 09.15).

(2) Segi pembelajaran

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada kurikulum. Kebijakan baru menyebabkan guru harus selalu siap menghadapi perubahan-perubahan lain yang mengikutinya misalnya metode baru, padahal metode lama belum dapat sepenuhnya dipraktekkan (Edi, wawancara, 26/4/2003, jam 09.00 WIB).

(3) Segi kemitraan dengan masyarakat

Terbentuknya Komite Madrasah yang beranggotakan perwakilan guru, perangkat desa, alumni, masyarakat sekitar, wali murid, yayasan dan pihak-pihak lain. Peranannya mengumpulkan dana-dana pembangunan dan dana insidental lain (Achmad Bandi, wawancara, 21/4/2003, jam 09.30 WIB).

c) MTs Bustanul Ulum

(1) Segi pendanaan

Sebagaimana sekolah lain tidak ada pengaruh berarti bagi lembaga mereka. Perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah swasta tidaklah sebesar terhadap sekolah negeri. MTs Bustanul



Ulum belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah daerah (Munawir, wawancara, 23/4/2003, jam 10.00 WIB).

(b) Segi partisipasi masyarakat terhadap sekolah

Terbentuk Komite Madrasah dengan peranan mengumpulkan dana insidental, dana pembangunan, melaksanakan peringatan hari besar, dan mengontrol program sekolah.

d) MTs Zainal Abidin

(1) Segi pendanaan

Otonomi tidak berpengaruh banyak pada pendanaan di MTs Zainal Abidin, karena sebelum pemberlakuan otonomi-pun MTs swasta harus mandiri dalam memenuhi pembiayaan lembaga mereka.

(2) Segi partisipasi masyarakat

Penbentukan Komite madrasah untuk mengakomodir kemitraan masyarakat dengan MTs. Peranannya adalah sebagai kontrol bagi pelaksanaan pendidikan di MTs Zainal Abidin, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam dan membantu dalam pengadaan dana untuk kepentingan pendidikan di lembaga ini.

2) Moralitas

Nilai-nilai yang dianut siswa mulai mengalami pergeseran, hal itu terjadi pada semua MTs swasta. Walaupun tidak pada tingkat yang

parah, semisal tawuran, tetapi untuk sekolah dengan identitas keagamaan seperti Madrasah Tsanawiyah sekecil apapun penurunan moral siswa akan terlihat nyata oleh masyarakat. Pergeseran tersebut misalnya pergaulan antara siswa dan siswi yang mulai kehilangan batas, siswa berani merokok di lingkungan madrasah, serta cara berpakaian siswi yang mulai meninggalkan norma. Pergeseran nilai tersebut merupakan bias dari pergeseran nilai di masyarakat serta akibat media-media informasi seperti televisi, majalah maupun media lain (Edi, wawancara, 21/4/2003, 10.30).

### C. Analisa Data

Pada hakekatnya pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia adalah perpanjangan dari pendidikan yang dilaksanakan pada masa penjajahan yang kemudian berkiblat pada pembaharuan pendidikan yang lahir di Amerika serikat pada tahun 50-an yang hanya menitikberatkan pada metode agar siswa menguasai basic skill dan mata pelajaran yang diajarkan. Struktur dan mekanisme praktik pendidikan tersebut dan implementasinya di negara sedang berkembang menghasilkan suatu sistem yang tidak sensitive terhadap perkembangan masyarakat (Zamroni, 2000 : 24)

Padahal pendidikan akan selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Demikian pula pendidikan jalur sekolah sebagai salah satu jenis pendidikan yang paling diminati masyarakat akan terus mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadi karena adanya dialektika antara manusia dengan dunia sosio kultural yang dihadapinya. Setiap perubahan memunculkan kebutuhan dan tantangan baru yang perlu



segera direspon dan diantisipasi. Pada bagian ini akan disajikan analisa dari dua rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada Bab I, yaitu:

a. Tantangan internal pendidikan di MTs swasta di Kecamatan Pujer

Di negara-negara demokratik, diharapkan sistem pendidikannyapun harus demokratik. Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik disini mencakup arti baik secara horisontal maupun vertikal (Hasbullah, 1999 : 241).

Berjalan tidaknya proses demokrasi pendidikan tersebut bisa dilihat dari pemerataan pendidikan penduduknya. Di kecamatan Pujer, ada 0,6% penduduk berpendidikan sarjana, 2,1% berpendidikan tingkat menengah, 3,6% berpendidikan sekolah menengah pertama, 24,4% berpendidikan SD, 60,5 masih duduk di bangku sekolah dan sisanya sebanyak 8,8 tidak berpendidikan.

Data diatas menunjukkan bahwa sekitar 33,2 % penduduk tidak mengenyam pendidikan minimal seperti yang diprogramkan pemerintah yaitu pendidikan dasar 9 tahun. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan semangat demokrasi pendidikan dan hal itu berarti proses demokrasi pendidikan belum berjalan dengan baik, apalagi angka tersebut dapat bertambah besar mengingat tidak semua peserta didik yang tamat sekolah dasar melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya. Sebab-sebab ketidak

merataan pendidikan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- 2) Status ekonomi masyarakat Pujer yang masih lemah  
ada sekitar 13,3% penduduk merupakan buruh tani dan 37,7%  
adalah petani penggarap
- 3) Tidak adanya jaminan bahwa pendidikan jalur sekolah dapat  
meningkatkan taraf hidup mereka.

Masalah - masalah tersebut selalu menjadi kendala dalam proses demokrasi pendidikan.

Kalau ketidakmerataan memperoleh pendidikan menurut sex dan desa/kota sudah dapat diperkecil dengan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan, tidak demikian dengan ketidakmerataan pendidikan diantara penduduk miskin dan kaya. Perbedaan pendidikan menurut status ekonomi antara kaya dan miskin masih sulit untuk dipecahkan. (Zamroni, 2000 : 98).

Selain pendidikan penduduk yang belum merata tantangan yang perlu dijawab oleh MTs swasta di kecamatan pujer adalah masalah kurikulum. Karena demokratisasi pendidikan tidak hanya berarti pemerataan pendidikan masyarakat, lebih luas dari itu berarti adanya ruang gerak bagi sekolah untuk mengapresiasi ide-idenya dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung dengan faktor-faktor lain yang salah satunya adalah kurikulum.



Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ( UU Sisdiknas pasal 1 point (19) ). Sebagai perangkat pencapaian tujuan, kurikulum harus dimiliki semua sekolah dan diimplementasikan dalam program-program riil.

Semua MTs swasta di Puger menggunakan kurikulum yang serupa yaitu Kurikulum 1994 dengan penjabaran bidang studi Pendidikan Agama Islam menjadi lima bidang studi. Kurikulum ini diaktualisasikan dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Dalam kegiatan tersebut, metode yang sering digunakan adalah mencatat dan ceramah. Metode ini sebenarnya kurang merangsang daya kreatif siswa, sehingga diperlukan metode-metode lain yang perlu dicoba untuk merangsang kreatifitas siswa. Dan untuk itu maka diperlukan sumber daya kependidikan yang memiliki kualitas yang cukup baik. Untuk dapat disebut berkualitas perlu dipenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Para orang tua telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah. Mereka tidak cukup waktu untuk mendidik anaknya sebagaimana yang diharapkan. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk diberikan kepada anaknya. Sebagian tanggung jawab pendidikan anak-anak tersebut terletak ditangan para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Itu sebabnya guru harus dididik dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

secara efisien dan efektif. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika fungsi dan peran guru diakui sebagai profesi. ( Hamalik, 2000 : 6-7 ).

Tenaga kependidikan di Pujer pada tahun 2002-2003 berjumlah 63 dengan proporsi kepala sekolah 6,3%; tenaga Tata Usaha 6,3% dan sisanya adalah tenaga pengajar(guru). Tetapi hampir semua kepala sekolah dan TU juga sekaligus adalah guru. Dari keseluruhan jumlah tersebut 50,8 % berpendidikan D3 dan S1 serta sisanya 49,2 % berpendidikan SMU, D1 dan D2. Artinya bila ditinjau dari sudut kompetensi profesi maka ada 49,2 % tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi kewenangan untuk menjadi tenaga kependidikan, karena tidak memiliki ijazah keguruan. Karena bila mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 42 maka untuk menjadi tenaga kependidikan khususnya tenaga pengajar harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi.

Setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Dengan demikian dia memiliki kewenangan mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai fungsi dan tugasnya. Dengan demikian seorang calon guru seharusnya telah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu (Hamalik, 2002 : 7).

Bahkan dari 50,8 % tenaga kependidikan yang memiliki kelayakan mengajar sebagian “salah kamar”, mereka mengajar bidang studi yang tidak kompeten dengan spesifikasi ijazah yang dimiliki.



Rendahnya jumlah tenaga pendidikan dengan kelayakan di MTs swasta di Pujer terkait dengan beberapa faktor lain yaitu proses rekrutmen dan kompensasi bagi tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada proses perekrutan yang dilakukan masing-masing MTs swasta, syarat yang diajukan bagi calon tenaga pendidikan telah memenuhi pendekatan tenaga pendidikan yang ideal, tetapi pada prakteknya idealisme tersebut tidak dapat seratus persen diterapkan. Menurut salah seorang pengurus yayasan Bustanul Ulum, "Idealnya seorang tenaga pendidikan harus memenuhi kompetensi keahlian. Khususnya guru harus memiliki kompetensi mengajar, artinya minimal berijazah S1 pendidikan, tetapi sedikit sekali orang yang memenuhi syarat yang bersedia mengajar di madrasah swasta, karena memang kurang menjanjikan" (Baihaqi, wawancara, 17 /4/2003, jam 09.10 WIB).

Faktor kompensasi dan kesejahteraan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya minat sarjana-sarjana pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta. Menurut salah satu pengajar MTs Bustanul Ulum), "Mengajar di lembaga seperti ini, membutuhkan ketulusan, karena sebagian merupakan pengabdian murni. Pekerjaan ini tidak bisa dijadikan mata pencaharian utama. Itulah sebabnya hampir sebagian besar pengajar memiliki usaha lain diluar mengajar. Bahkan banyak diantaranya memilih

berhenti, khususnya setelah menikah” (Usnadi, wawancara, 23/4/2003, jam 08.15 WIB).

Jika sumber daya yang kompeten kurang memadai maka yang harus dilakukan adalah memberdayakan sumberdaya manusia yang ada. MTs swasta di Pujer menyadari hal tersebut oleh karena itu upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang mereka miliki dilaksanakan. MTs Al Barokah melaksanakan tiga bulan masa percobaan mengajar bagi guru baru, mengirimkan tenaga kependidikan mereka dalam penataran-penataran yang relevan. MTs Al Ma'arif selain mengirimkan tenaga kependidikannya dalam penataran-penataran kependidikan, juga mewajibkan guru-guru ikut MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di kabupaten setiap bulan

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki keahlian sebagai guru. Seorang guru tidak hanya harus memiliki berbagai kualifikasi, baik kepribadian, kemampuan mengajar, penguasaan spesialisasi dalam disiplin atau bidang studi tertentu. Sehingga walaupun ada pelatihan-pelatihan dan penataran-penataran yang harus diikuti untuk menunjang dan meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan di Kecamatan Pujer, tetapi kredibilitas lembaga pendidikan jalur sekolah yang bersangkutan dalam pandangan masyarakat akan berbeda jika tenaga pendidikan yang dimiliki adalah personil-personil yang kompeten di bidangnya.



Kompetensi-kompetensi tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh tenaga kependidikan di kecamatan Pujer khususnya oleh tenaga pengajar, karena gurulah yang bertanggung jawab merealisasikan kegiatan sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada anak didiknya.

Tetapi tenaga kependidikan juga harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Faktanya MTs swasta di kecamatan Pujer semuanya minus sumber daya pendidikan. Fasilitas baik itu fisik maupun non fisik terkesan seadanya. Tidak ada yang memiliki laboratorium dan perpustakaan. Bahkan ada MTs Zainal Abidin melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas yang disekat menjadi dua ruangan yang masing-masing dijadikan kelas. Hal itu tentu menciptakan suasana belajar yang tidak nyaman. Sebagaimana dikatakan beberapa siswa bahwa keadaan itu mengganggu konsentrasi belajar mereka dikelas.

Tantangan lain yang dihadapi MTs di Pujer adalah tingkat Drop Out yang perlu penanganan khusus. Ada sekitar 9,9 % siswa yang drop out dengan alasan perekonomian dan tradisi kawin muda. Menurut para tenaga kependidikan di MTs tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya drop out ini, karena terkait juga dengan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka.

b. Tantangan Eksternal Pendidikan Jalur Sekolah

Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antarbangsa dan negara. Karena saling ketergantungan dan saling keterbukaan ini, semua negara pada prinsipnya akan terbuka terhadap pengaruh globalisasi, tetapi pengaruh globalisasi ini tidak sama kadarnya pada setiap negara. Negara berkembang akan cenderung lebih terbuka pada pengaruh globalisasi daripada negara maju. Dalam era modern ini, keberadaan pendidikan antara lain diharapkan akan mampu mengantarkan umat manusia yang mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan masyarakat. Dunia pendidikan dituntut agar mampu menghasilkan manusia yang bersifat "ready for use" dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat (Prianto, 2000 : 34).

MTs swasta di Puger hampir seluruhnya tidak memiliki program khusus yang berhubungan dengan penguasaan teknologi bagi siswa. Juga tidak memiliki program yang dapat memberi nilai ekonomis pada siswa ketika mereka telah tamat dari pendidikannya. Bahkan dari 50 % madrasah yang memiliki perencanaan program keterampilan tidak dapat melaksanakan programnya karena kekurangan dana. Harus diakui masalah ini selalu dihadapi sekolah swasta.

Namun dana yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat muslim dalam pengembangan pendidikan modern dewasa ini sangat terbatas, sementara biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan



teknologi menyebabkan madrasah terus menerus ketinggalan dengan dunia pendidikan yang lain (Rahim, 2001 : 109).

Madrasah harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. MTs swasta tidak bisa menggantungkan diri kepada bantuan pemerintah, karena perhatian pemerintah tidaklah sebesar perhatian kepada sekolah negeri. Menurut MTs Bustanul Ulum, lembaga ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah Bondowoso.

Terlebih setelah bergulir otonomi daerah dimana pada pelaksanaannya tergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Padahal kabupaten Bondowoso bukanlah daerah yang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Masalah dana ini harus dihadapi oleh semua MTs swasta di Pujer. MTs Zainal Abidin misalnya, selain tidak dapat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah lembaga mereka juga tidak mungkin berharap banyak dari pemasukan BP3. Menurut salah satu guru pembayaran BP3 dari siswa-siswa mereka tidak berjalan lancar, orang tua hanya sadar untuk menyekolahkan anaknya, tetapi tidak untuk biaya anak-anaknya. Sementara MTs Bustanul Ulum belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah Bondowoso.

Terkait dengan otonomi, MTs swasta di Pujer kurang memanfaatkan momentum ini untuk berinteraksi aktif dengan masyarakat sekitarnya. MTs Bustanul Ulum mereka hanya melakukan pertemuan sekali dalam

satu semester dengan wali murid itupun bersamaan dengan pembagian raport siswa (Taufik, wawancara, 23/4/2003, jam 08. 45 WIB) demikian pula MTs yang lain, hanya memanfaatkan saat penerimaan raport siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat yang tentunya hanya terbatas pada orang tua siswa.

Selain masalah tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa globalisasi menyebabkan arus yang begitu cepat dan tidak dapat dibendung dari begitu banyak dan beragam informasi. Dan arus informasi ini membawa tidak hanya pengetahuan tetapi juga berbagai nilai. Derasnya arus informasi yang masuk ke Indonesia tanpa adanya filter seleksi, seperti yang sedang terjadi saat ini, membuat para remaja dan pelajar kita selalu berada pada kondisi transisi kultural. Mereka belum paham sepenuhnya mengenai ukuran positif-negatif moral dan perilaku universal.

Di Puger, semua MTs swasta menyatakan bahwa ada pergeseran nilai yang melanda siswa-siswa mereka. Hal yang dulunya tabu menjadi hal biasa saat ini. Pergaulan antara siswa laki-laki dan perempuan semakin tidak mengenal batas, jika dibiarkan bukan tidak mungkin nilai-nilai yang lain menjadi kabur. Walaupun ada program-program yang dilakukan untuk memperdalam ilmu agama siswa, tetapi diperlukan kegiatan yang tidak hanya memperdalam aspek kognitif semata tetapi perlu internalisasi



nilai-nilai agama kepada siswa dan itu bisa dilakukan melalui program-program madrasah. Dan perlu adanya sanksi bagi pelanggarnya. Penyimpangan perilaku anak-anak dalam kelompoknya, betapapun kecilnya perlu diberi *feed back*. Ini perlu dilakukan karena penyimpangan itu secara tidak terasa akan bersifat akumulatif, jika dibiarkan tanpa adanya tindak peringatan dan teguran yang bersifat mendidik

#### **D. Diskusi dan Interpretasi**

Pendidikan adalah bagian dari proses kehidupan manusia yang terus berkembang. Sementara manusia merupakan unsur terpenting pembentukan masyarakat, artinya ada keterkaitan antara pendidikan dan masyarakat. Dapat dikatakan antara apa yang terjadi dimasyarakat dengan apa yang menjadi bahan kajian dunia pendidikan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu sisi (masyarakat) bergerak ke depan, maka sisi yang lain (pendidikan) juga harus bergerak ke depan (Prianto, 2000 : 33).

Madrasah merupakan sekolah beridentitas Islam. Jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan keunikan tersendiri. Keunikan madrasah karena hampir terbesar jumlah madrasah adalah *milik swasta*. Berbeda dengan sekolah di lingkungan Dikbud. Madrasah Ibtidaiyah swasta 93,1 %. Keadaan ini terbalik dengan SD swasta yang hanya 6,9 %. Madrasah Tsanawiyah swasta berjumlah 75,7 %, sedangkan di Dikbud SMP 55,9 % sekolah swasta. Keadaan ini menunjukkan dunia madrasah milik masyarakat (Rahim, 2001 : 131).

Tetapi sayangnya madrasah sering dipandang sebelah mata dan dianggap memiliki kualitas lebih rendah dari sekolah umum. “ Menurut persepsi masyarakat, bahwa madrasah mempunyai kelebihan dalam bidang pendidikan akhlak/moral, namun lemah dalam bidang pengetahuan umum. Sebaliknya sekolah umum mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan umum sebagai bekal mencari nafkah, namun lemah dalam pembinaan akhlak/moral” (Rahim, 2001 : 252 ).

Gambaran tersebut menunjukkan upaya peningkatan mutu madrasah merupakan tuntutan yang semakin mendesak dan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini dimaksudkan semata-mata agar ikhtiar pendidikan yang kita laksanakan memberikan makna yang signifikan bagi pembangunan bangsa. Untuk menentukan upaya yang harus dilakukan maka perlu dilakukan pemetaan terhadap tantangan-tantangan yang perlu direspon. Perlu dilihat bahwa masa depan pendidikan islam di Indonesia (madrasah) ditentukan baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Maka tantangan yang dihadapi MTs swasta di Puger adalah :

#### 1. Tantangan Internal

Di negara-negara yang demokratis, diharapkan sistem pendidikannya pun harus demokratis. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya (Hasbullah, 1999 : 241).



Upaya mewujudkan demokrasi pendidikan sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui gerakan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Tahun). Gerakan ini memang berhasil mengurangi jumlah anak tidak sekolah di kota, tetapi kurang berhasil untuk tataran pedesaan bahkan gaung dari pelaksanaan Wajar 9 Tahun ini mulai berkurang. Padahal untuk mencapai tujuan demokrasi pendidikan ini perlu keberhasilan gerakan ini, tetapi hal itu memang tidak mudah diwujudkan. Gerakan wajib belajar memang harus berhasil. Untuk menuju keberhasilan itu dukungan masyarakat sangat diperlukan mengingat wajib belajar yang kita lakukan tidak memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Melakukan gerakan nasional yang berkonotasi wajib, tetapi tidak bersanksi hukum merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Sebab target wajib belajar itu justru sebagian besar berada pada masyarakat yang secara relatif pendapatan mereka rendah dan kesadaran terhadap arti penting pendidikan bagi anaknya juga rendah. Maka perlu sosialisasi aktif dari pemerintah dan madrasah/sekolah kepada masyarakat dan itu merupakan peluang bagi madrasah untuk sekaligus mensosialisasikan keberadaan lembaga mereka.

Demokrasi pendidikan ini bagi seluruh MTs swasta di Pujer merupakan peluang besar, karena "garapan" yang harus dikerjakan untuk kecamatan Pujer sangat besar. Masih banyak masyarakat, khususnya usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan minimal seperti anjuran pemerintah. Selain masalah demokratisasi pendidikan madrasah juga

dihadapkan pada kualitas sumberdaya manusia (tenaga kependidikan) khususnya guru yang masih perlu perbaikan.

Tenaga guru di madrasah saat ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. *Pertama*, guru tidak layak, yang bisa dikategorikan *unqualified* maupun *underqualified*. Artinya guru tersebut belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang telah ditentukan oleh perundangan yang berlaku. Misalnya untuk mengajar di MI, guru minimal berijazah D II, di MTs lulusan D III di MA lulusan S1 atau D IV. *Kedua*, guru layak tapi salah kamar (*mismatch*). Artinya latar belakang pendidikannya tidak cocok dengan bidang studi yang dipegangnya. Misalnya lulusan fakultas Tarbiyah jurusan PAI mengajar matematika, guru lulusan D II agama menjadi guru kelas dan sebagainya. *Ketiga*, layak dan cocok bidang studi yang diajarkan. Lulusan jenjang pendidikan guru sesuai dengan ketentuan yang ditentukan (Rahim, 2001 :165).

Pada madrasah swasta guru dengan kategori tidak layak mencapai 80 %. Ini tantangan berat yang dihadapi madrasah saat ini, demikian pula yang dihadapi oleh MTs swasta di kecamatan Pujer, jumlah tenaga kependidikan yang kurang memenuhi syarat kualifikasi profesionalisme hampir setengah dari jumlah tenaga kependidikan yang ada (49,2 %). Khususnya MTs Bustanul Ulum, dimana 72,2 % tenaga kependidikan termasuk dalam kategori kurang memenuhi syarat kualifikasi mengajar. Walaupun profesionalitas tidak semata-mata dinilai dari ijazah, tetapi untuk memberi nilai tambah bagi MTs mereka dan sebagai upaya meningkatkan kualitas diri, maka menimba ilmu keguruan dari lembaga yang kompeten dengan profesinya adalah mutlak diperlukan. Tetapi MTs Zainal Abidin memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga yang lebih berkualitas dan memiliki daya tarik yang besar, karena



dalam segi tenaga kependidikan mereka lebih memenuhi syarat kualifikasi.. Lembaga ini memiliki 75 % tenaga pendidikan yang layak mengajar, tetapi lembaga ini lemah dalam pendanaan.

Besarnya tenaga kependidikan yang unqualified tersebut berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kependidikan yang perlu memperhatikan selektifitas. selektifitas perekrutan sangatlah perlu karena guru adalah pelaksana program-program kurikulum dan madrasah. Berkenaan dengan kurikulum, madrasah juga menghadapi tantangan. Kurikulum madrasah tsanawiyah yang ditetapkan sama dengan kurikulum SMP mendatangkan tantangan dan peluang bagi madrasah Tsanawiyah. Peluang yang diperoleh adalah adanya kesempatan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa madrasah mampu bersaing dalam ilmu eksakta. Disisi lain kurikulum ini akan terasa lebih berat bagi siswa karena beban jam yang ditempuh lebih banyak dari SMP. Madrasah perlu mengembangkan program-program pendidikan mereka untuk mendukung kurikulum ini. Di Puger MTs yang menghadapi tantangan terbesar dalam kurikulum ini adalah MTs Al Barokah. Dengan waktu pembelajaran yang lebih pendek dari MTs lain maka beban yang ditimbulkan akan semakin besar. Guru harus kreatif dalam mencapai target pembelajaran dalam waktu yang ada serta menghabiskan materi kurikulum tanpa meninggalkan siswa.

Keidentikan bahwa siswa madrasah adalah siswa yang berekonomi lemah adalah tantangan tersendiri bagi madrasah. Hal itu berakibat pada besarnya siswa drop out dari lembaga mereka dan perlu penanganan khusus untuk memperkecil angka drop out tersebut. Tidak hanya tantangan-tantangan yang disebut diatas yang menghadang madrasah, minus penyediaan sumberdaya pendidikan juga harus dihadapi madrasah.

Madrasah yang akrab dengan masyarakat yang kurang beruntung, dihadapkan dengan dana, sarana dan prasarana yang seadanya. Ruang kelas yang tidak memadai, laboratorium dan perpustakaan yang tidak tersedia, kesejahteraan guru yang minimal merupakan problem besar yang melingkapi kondisi madrasah (Rahim, 2001 : 169).

Semua tantangan yang disebutkan diatas merupakan tantangan yang bersifat internal yang juga dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer yaitu, kompetisi dalam demokrasi pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dan poses perekrutan yang masih rendah serta perlu diperbaiki dan ditingkatkan, perbaikan dan peningkatan aplikasi kurikulum dalam program-program madrasah, tingkat drop out yang masih tinggi dan perlu penanganan khusus serta minus madrasah dalam sumberdaya pendidikan baik berupa pendanaan maupun sarana prasarana.

## 2. Tantangan eksternal pendidikan MTs swasta

Keberadaan madrasah tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi disekitarnya, baik lokal, nasional maupun global. Sebagai institusi pendidikan, madrasah terikat dengan hukum perkembangan



masyarakat, bahwa perubahan disatu sektor masyarakat akan berdampak dan berpengaruh pada sektor lainnya.

Pada skala global tantangan terbesar muncul dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta dari dunia ekonomi. Menurut Husni Rahim hal itu karena dalam era globalisasi, sebagaimana dikatakan para pengamat sosial, terjadi revolusi informasi yang ditandai oleh tingginya prestasi umat manusia dalam teknologi informatika (2001 :183).

Serta perdagangan bebas yang secara formal telah diratifikasi dalam AFTA (2010) dan APEC (2020) akan mengarahkan umat manusia pada ketentuan-ketentuan bekerjanya mekanisme pasar. Globalisasi juga diartikan batas negara dapat dikatakan hampir tidak ada; globalisasi disebut pula era reformasi dan keterbukaan, era liberalisasi, pasar bebas dan kompetisi global. Juga era kerjasama regional dan global (2001 : 128). Dan tugas madrasah adalah mengimbangi laju perkembangan tersebut, melahirkan dan menyiapkan output yang mampu bersaing dan menguasai perubahan tersebut. MTs swasta di Puger hampir seluruhnya belum memiliki program yang memberi nilai "komersial" pada outputnya, baik itu menyangkut teknologi maupun keterampilan khusus. Padahal teknologi tidak harus berkonotasi engan alat berat. Untuk memberi nilai jual pada outputnya MTs Swasta bisa menerapkan teknologi tepat guna yang ringan dan sesuai dengan konisi geografisnya.

Pada saat bersamaan lembaga madrasah juga dihadapkan pada tantangan berskala nasional yaitu otonomi daerah yang berarti otonomi pendidikan. Pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan, merupakan konsekuensi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Otonomi pendidikan sebenarnya memberikan peluang bagi madrasah, sebab dengan begitu akan dapat bersaing secara sehat dengan lembaga pendidikan umum. Hal tersebut sangat fungsional untuk memacu kemajuan dilembaga masing-masing. Kebijakan pemerintah tersebut memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas sekolah diwilayahnya masing-masing. Maka diperlukan kesiapan lembaga madrasah dan sumberdaya-sumberdaya yang berkualitas untuk menghadapi kompetisi dalam pelaksanaan otonomi.

Pada tataran implementasi otonomi, madrasah harus memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengolahan sumber daya pendidikan.

Masyarakat dapat menjadi kontrol bagi siswa mereka saat berada di masyarakat. Hal itu perlu karena pada sisi lain madrasah juga harus menghadapi kenyataan bergesernya nilai-nilai masyarakat akibat perkembangan IPTEK. Siswa-siswa MTs yang berada dalam usia transisi belum sepenuhnya mampu membedakan nilai yang benar dan salah, sehingga dengan mudah mereka terbawa nilai negatif yang ditimbulkan IPTEK.



tersebut. Maka perlu kerjasama madrasah dan masyarakat dalam merencanakan program pendidikan dan evaluasi program pendidikan serta pengawasan terhadap siswa.

Hal ini penting diperhatikan karena ada hubungan timbal balik antara madrasah/sekolah dengan masyarakat. Pendidikan seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat sehingga untuk memperoleh hasil yang relevan maka masyarakat harus turut dilibatkan dalam proses itu sendiri. Prinsip yang seharusnya diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat.

*Pendidikan dari masyarakat* artinya bahwa pendidikan haruslah memberikan jawaban kepada kebutuhan (needs) dari masyarakat sendiri. *Pendidikan oleh masyarakat* artinya bahwa masyarakat bukanlah merupakan obyek pendidikan yaitu untuk melaksanakan kemauan negara atau suatu kelompok semata tetapi partisipasi yang aktif dari masyarakat, dimana masyarakat mempunyai peranan didalam setiap langkah program pendidikannya. *Pendidikan bersama-sama masyarakat* artinya masyarakat diikutsertakan didalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri ( Tilaar, 2000 :169).

Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, maka pendidikan tidak akan terasing dari lingkungannya dan masyarakat akan merasa ikut memiliki pendidikan tersebut. Karenanya otonomi merupakan tantangan tersendiri bagi MTs Swasta di Pujer, baik itu menyangkut pendanaan maupun dalam implementasi dan perencanaan program sekolah. Dan momentum ini belum dimanfaatkan oleh MTs swasta di Pujer.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab tiga, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Umum**

Tantangan pendidikan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer adalah tantangan internal dan eksternal.

##### **2. Khusus**

- a. Tantangan internal pendidikan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer berupa demokrasi pendidikan yang belum berjalan dengan baik, kurangnya efektifitas implementasi kurikulum dalam proses pendidikan dan ini terkait dengan program pendidikan yang masih lemah, rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang terkait dengan kurangnya selektifitas rekrutmen, tingkat drop out yang masih tinggi serta minus sumber daya pendidikan baik berupa pendanaan maupun sarana prasarana.
- b. Tantangan eksternal pendidikan yang dihadapi MTs swasta di kecamatan Pujer pada tataran global berupa rendahnya kemampuan mengakses teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan dan rendahnya kemampuan madrasah memberi nilai ekonomis pada output-nya. Pada



tataran nasional berupa kurangnya kesiapan madrasah menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan perlunya pemantapan program-program pendidikan yang khusus diproyeksikan untuk meminimalisasi degradasi moral dikalangan siswa sebagai akibat dari pergeseran nilai di masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi lembaga pendidikan
  - a. Mengadakan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dasar terhadap masyarakat, upaya itu dapat dilakukan dengan menggandeng instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat,
  - b. Mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kependidikan dengan mengikuti penataran-penataran dan pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah,
  - c. MTs swasta di Pujer perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, hal itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pendidikan di masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan sekolah dan ikut berpartisipasi dalam melengkapi fasilitas madrasah,
  - d. Penting untuk menjalin jaringan kerja (*net work*) antar MTs dan dengan pihak yang memiliki komitmen pada pendidikan guna merumuskan

pendidikan yang sesuai untuk daerah Kecamatan Pujer, yang dapat diaplikasikan dalam muatan lokal,

- e. Melakukan pemantapan pada program-program madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan di lembaga masing-masing serta menciptakan suasana agamis dilingkungan madrasah untuk mempertegas ciri khas keislamannya.
2. Bagi pemerintah
- a. Memberikan perhatian yang lebih baik kepada sekolah-sekolah swasta, khususnya masalah finansial,
  - b. Menggandeng madrasah dan sekolah untuk mensosialisasikan wajib belajar kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Robby H. 2003, "Peran Guru Di Persimpangan Jalan Pendidikan" dalam *Mimbar Pembangunan Agama (No.196/Syawal-Dzulqo'idah 1423 H/Januari 2003 M/th.XVII)*, Surabaya:Depag Jatim. 34-35.
- Djiwandono, J. Soedjati. 2000, "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Editor:Sindunata)*, Yogyakarta:Kanisius. 103-111.
- Djumhur dan Danasuparta, 1976, *Sejarah Pendidikan*. Bandung : CV Ilmu
- Hadi, Samsul, 2002, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah:Permasalahan dan Prospeknya Di Kabupaten Jember" dalam *IQRO'(No:6/XVIII/2002)*, Agustus. 2002, Jember:Unmuh Jember.
- Hamalik, Oemar, 1999, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Hasbullah, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendrawijaya, AJ, 1995, *Pengantar Pendidikan Seumur Hidup*, Jember:Depdikbud RI FKIP Unej.
- Hisyam, Djihad dan Suyanto, 2000, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta:Adicita Karya Nusa.
- Ihsan, Fuad, 1996, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman as Suyuthi, 1990, *Terjemah Al Jamius Shaghier 2*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Kartini, Kartono, 1992, *Pengantar ilmu Mendidik Teoritis(Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, Bandung:Mandar Maju.
- Mahfud, 2000, "Tantangan Pendidikan Memasuki Abad XXI" dalam *Mimbar Pembangunan Agama (No.161/Syawal-Dzulqo'idah 1420 H/Februari 2000 M/Th XIV)*, Surabaya:Depag Jatim. 36-37.
- Margono, S, 1997, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta.

- Marzuki, 2000, "Reformasi Pendidikan" dalam *Mimbar Pembangunan Agama* (No.167/Jumadil Awal-Jumadil Akhir1421/Agustus 2000 M/Th.XVI), Surabaya:Depag Jatim. 32-33.
- Moleong, J. Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S, 1999, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Nomida, Diana, 2000, "Arah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Historis" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (editor:Sindhunata), Yogyakarta : Kanisius,65-80.
- Pidarta, Made, 1997, *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Poerwadarminta,1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prianto, Agus, 2000, "Perubahan Masyarakat dan Perubahan Tuntutan Terhadap Pendidikan" dalam *Mimbar Pembangunan Agama* (No166/Maulid-Jumadil Awal 1421 H/Juli 2000 M/Th.XIV), Surabaya : Depag Jatim. 33-34.
- Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos.
- Saefuddin, A, 2000, "Mencari Format Ekstrakurikuler Yang Produktif" dalam *Pendais (Jurnal Komunikasi Pendidikan Agama Islam)* (Vol. 1 No.3 September 2000), Jakarta : Ditbinpispun Ditjen Binbaga Islam Depag RI. 66-71.
- Salim, Peter, tt, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Soedijarto, 2000, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Membangun Peradapan Negara-Bangsa (sebuah usaha memahami makna UUD'45)*, CINAPS.
- Suderadjat, Hari, 2002, *Landasan Konseptual Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)*, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali.
- Suryadi, Ace dan Tilaar, H.A.R, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan (suatu pengantar)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Tholhah, Ahmad, 2000, "Otonomi Daerah dan Problem Pendidikan" dalam *Mimbar Pembangunan Agama* (No.163/dzulhijjah-Muharram 1420-1421 H/April 2000 M/Th.XIV), Surabaya : Depag Jatim. 36-37.
- Tilaar, H.A.R, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*,. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2000, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia (Strategi Reformasi Pendidikan Nasional)*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tim Penterjemah, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 1979, Jakarta:Depag RI.
- Tim Penyusun, 2002, *Kebijakan Kurikulum (Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sekolah Menengah)*, Jakarta : Depdiknas.
- Tim Penyusun, 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum dan Hasil Belajar)*, Depag RI.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sisitem Pendidikan Nasional, Sisidiknas 2003*, Bandung : Citra Umbara.
- Wahid, Abdul, 1996, "Demokrasi Dalam Pendidikan Anak Perempuan" dalam *Mimbar Pembangunan Agama* (No.118/Shafar 1417 H/juli 1996 M/Th.X), Surabaya : Depag Jatim. 55-57.
- Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Zubairi, Munif,1997, "Memantau Eksistensi Pendidikan Formal" dalam *Mimbar Pembangunan Agama* (No. 134/Sya'ban-Ramadhan 1418/Desember1997 M/Th. XII), Surabaya : Depag Jatim. 60-62.
- ©

## **GUIDE INTERVIEW**

### **A. Tantangan Internal**

1. Se jauh ini bagaimanakah peranan MTs swasta dalam demokrasi pendidikan ?
2. Kurikulum merupakan factor penting dalam pendidikan. Bagaimana kurikulum di MTs swasta ?
3. Bagaimana program-program madrasah untuk mendukung kurikulum dan tercapainya tujuan madrasah ?
4. Tenaga pendidikan merupakan fasilitator serta pelaksana program madrasah. Bagaimana standar profesionalitasnya dan apa upaya untuk meningkatkannya ?
5. Drop out merupakan pelaksanaan pendidikan yang kurang efektif. Bagaimana tingkat drop out di Mts swasta dan bagaimana upaya penanggulangannya ?

### **B. Tantangan eksternal**

1. Saat ini bergulir perdagangan bebas, mau tidak mau pendidikan harus memberi standar internasional atau minimal memberi nilai jual kepada outputnya agar mampu berkompetisi. Sejauhmana MTs swasta merespon perkembangan tersebut ?



2. Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan program-program madrasah untuk menghasilkan output yang bersaing, bagaimana program di MTs swasta terkait dengan hal tersebut ?
3. Bagaimana pengaruh otonomi daerah dalam pelaksanaan pendidikan di MTs swasta ?
4. Otonomi pendidikan menawarkan porsi bagi partisipasi masyarakat, sejauhmana MTs swasta memanfaatkannya ?
5. Degradasi moral yang terjadi di masyarakat khususnya dikalangan siswa perlu direspon madrasah, bagaimana dengan MTs swasta menyikapinya ?

**DAFTAR JURNAL PENELITIAN**

**TANTANGAN PENDIDIKAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DI KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**  
**TAHUN 2002-2003**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	11 April 2003	Observasi lokasi MTs Zainal Abidin.
2.	14 April 2003	Mencari dokumen-dokumen kependudukan dan pendidikan jalur sekolah di kecamatan.
3.	15 April 2003	Observasi lokasi MTs Bustanul Ulum dan MTs Al Barokah.
4.	16 April 2003	Wawancara dengan Waka kurikulum MTs Zainal Abidin.
5.	17 April 2003	Wawancara dengan Kaur TU dan guru MTs Al Barokah. Wawancara dengan Wakasek MTs Bustanul Ulum dan pengurus Yayasan Bustanul Ulum.
6.	21 April 2003	Observasi lokasi dan sarana prasarana MTs Al Ma'arif. Wawancara dengan Kasek dan guru MTs Al Ma'arif.
7.	22 April 2003	Wawancara dengan Wakasek MTs Al Barokah.
8.	23 April 2003	Wawancara dengan guru MTs Bustanul Ulum.
9.	24 April 2003	Wawancara dengan Kasek dan guru MTs Zainal Abidin.
10.	25 April 2003	Wawancara dengan kepala sekolah serta mencari dokumen di MTs Bustanul Ulum
11.	26 April 2003	Wawancara dengan kepala sekolah MTs. Al Ma'arif





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : <http://stain-jember.cjb.net> -- e-mail : [stainjember@hotmail.com](mailto:stainjember@hotmail.com)

**J E M B E R**

Nomor : ST.08/ TL.00/742/02

Lampiran :

Perihal : **Penelitian Untuk  
Penyusunan Skripsi**

Jember, \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

Sdr. Camat Pujer - Bondowoso

di Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini :

Nama : Nur Hamidah Lutfi  
N I M : 084 981 095  
Semester/Jurusan : IX / Tarbiyah

dalam rangka penyelesaian/penyusunan Skripsi, agar diizinkan untuk mengadakan riset/penelitian selama 60 hari di lingkungan daerah wewenang saudara dan menghubungi :

1. Kepala Sekolah STP Negeri Pujer
2. Kepala Sekolah MTs di Pujer
3. Pihak-pihak yang terkait
4. \_\_\_\_\_

Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang :

Tantangan Pendidikan Jalur Sekolah di Kecamatan Pujer  
Kabupaten Bondowoso Tahun 2002

Atas perkenan dan perhatian saudara, disampaikan terima kasih.

*Wassalam,*

Pymt, Ketua



Dr. Ainur Rafik, MAg

NIP. 150 224 740





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
**KECAMATAN PUJER**

Jl. Raya Pujer No.1 Telp.(0332) 422381  
BONDOWOSO 68271

SURAT - KETERANGAN

No : 070/159/430.721/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


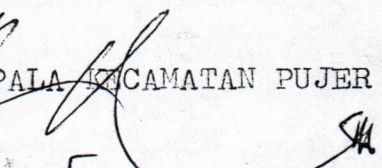
Nama : Nur Hamidah Lutfa  
N I M : 084 981 095  
Jurusan : Tarbiyah  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Sekolah : STAIN Jember

Telah melakukan penelitian mulai tanggal 07 April s/d 03 Juni 2003 dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul " Tantangan Pendidikan Jalur Sekolah di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 - 2003"di :

1. SLTP Negeri Pujer ;
2. MTs Al - Barokah ;
3. MTs Zainal Abidin ;
4. MTs Bustanul Ulum ;
5. MTs Al - Ma'arif .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pujer, 06 Juni 2003

  
KEPALA KECAMATAN PUJER  
  
Drs. AGUS SALAM, Msi  
PEMBINA

NIP. 510.062.586



**MATRIK PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>
Tantangan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003	Tantangan Pendidikan di MTs Swasta	1. Tantangan Internal	1. Demokratisasi Pendidikan 2. Kurikulum 3. Tenaga Kependidikan 4. Drop out 5. Sumber daya pendidikan	1. Responden : Guru Sekolah MTs Swasta di Pujer  2. Informan : - Kepala Sekolah - Wa. Ka Sekolah - Guru  - TU - Siswa - Perangkat Kecamatan 3. Dokumentasi 4. Kepustakaan	1. Populasi : seluruh guru MTs Swasta di Pujer  2. Penentuan Sampel : Metode purposive Sampling  3. Metode Pengumpulan Data : - Observasi - Interview - Dokumenter  4. Metode Analisa data : Metode Deskriptif Kualitatif	<b>Masalah Umum :</b> Bagaimana Tantangan Pendidikan di MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003 ?  <b>Masalah Khusus :</b> 1. Bagaimana Tantangan Internal Pendidikan di MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003 ?  2. Bagaimana Tantangan Eksternal Pendidikan di MTs Swasta di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003 ?